

**ANALISIS PENGARUH KEUANGAN INKLUSIF TERHADAP  
PROFITABILITAS PADA PERBANKAN SYARIAH DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**



Oleh

**KHALIFATUL UZHMA**

**NIM : 13540045**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2017**

**ANALISIS PENGARUH KEUANGAN INKLUSIF TERHADAP  
PROFITABILITAS PADA PERBANKAN SYARIAH DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana ekonomi (SE)



Oleh

**KHALIFATUL UZHMA**

**NIM : 13540045**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2017**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**ANALISIS PENGARUH KEUANGAN INKLUSIF TERHADAP  
PROFITABILITAS PADA PERBANKAN SYARIAH DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

Oleh

**KHALIFATUL UZHMA**

**NIM : 13540045**

Telah disetujui 18 Oktober 2017  
Dosen Pembimbing,



**Esy Nur Aisyah, SE., MM.**  
**NIP. 19860909 20160801 2 051**

Mengetahui:  
Ketua Jurusan



**Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D**  
**NIP. 19751109 199903 1 003**

## LEMBAR PENGESAHAN

### ANALISIS PENGARUH KEUANGAN INKLUSIF TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

#### SKRIPSI

Oleh

**KHALIFATUL UZHMA**

NIM : 13540045

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada 31 Oktober 2017

#### Susunan Dewan Penguji:

1. Ketua  
**Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D**  
NIP. 19751109 199903 1 003
2. Dosen Pembimbing/ Sekretaris  
**Esv Nur Aisyah, SE., MM.**  
NIP. 19860909 20160801 2 051
3. Penguji Utama  
**Dr. Siswanto, SE., M.Si**  
NIP. 19750906 200604 1 001

#### Tanda Tangan

(  )  
(  )  
(  )

Disahkan Oleh:  
Ketua Jurusan,



**Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D**  
NIP. 19751109 199903 1 003

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khalifatul Uzhma  
NIM : 13540045  
Fakultas /Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah (S1)

menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**ANALISIS PENGARUH KEUANGAN INKLUSIF TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 18 Oktober 2017

Hormat saya,



Khalifatul Uzhma  
NIM : 13540045

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tak sempurna ini aku persembahkan kepada:

### **KELUARGA TERCINTA**

Ayahku yang terhebat, Herli Antoni, S.Ag.

Ibuku yang tersabar, Nurhayati

Adik-adikku terkasih, Fauziatus Sania (Nana) dan Adiva Dara El Mufida (Elda)

Keluarga besar Kakek Martono dan Nenek Saniah di Medan

Keluarga besar Kakek (Alm) Muasan dan Nenek Rose di Malang

“Harta yang paling berharga adalah keluarga”

-Keluarga Cemara-

### **DOSEN PEMBIMBING**

Esy Nur Aisyah, SE., MM.

“A person who never made a mistake never tried anything new”

-Jacques Barzun-

### **JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)**

“Kadang kita belajar, kadang kita mengajar. Setiap orang adalah murid sekaligus guru. Pandai-pandailah memetik pelajaran dari setiap orang dan setiap kejadian”

-Ippho Santosa-

## HALAMAN MOTTO



*You're not a bad person.  
You're a very good person, who had bad things have happened to.  
Besides, the world isn't split into good people and Death Eaters.  
We've all got both light and dark inside us.  
What matters is the part we choose to act on.  
That's who we really are.  
-Sirius Black-*

## KATA PENGANTAR

Puji kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan untuk hidup di dunia yang fana ini dan menghendaki penulis untuk membuat sebuah karya tulis yaitu skripsi yang jauh dari kata sempurna. Sesungguhnya Allah SWT memberikan ridho yang tak mampu terbalaskan oleh ribuan kata pujian sekalipun.

Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyempurnakan agama, membimbing manusia kepada jalan kebenaran dan memberikan suri tauladan yang menjadikan hamba-hambanya mampu menjalani kehidupan dengan sebaik mungkin.

Penulis menyadari bahwa karya tulis yang tidak sempurna ini tidak akan berhasil dengan baik dan lancar tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Siswanto, SE., M.Si selaku Wakil Dekan I sekaligus Mantan Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ibu Esy Nur Aisyah, SE., MM selaku dosen pembimbing skripsi, tanpa beliau maka skripsi ini tidak akan pernah menemukan titik terang. Bimbingan beliau adalah jasa terbesar yang akan penulis ingat sepanjang masa.
6. Ayah Herli Antoni S.Ag, Ibu Nurhayati, adik-adik tercinta Fauziatus Sania A.P. dan Adiva Dara El Mufida yang senantiasa memberikan aliran doa, senyuman, cinta, kasih sayang, semangat dan teguran setiap hari.

7. Keluarga besar Kakek Martono di Medan-Malaysia dan keluarga besar (Alm.) Kakek Muasan di Malang yang memberikan semangat dan dukungan.
8. Cokorda Alit Arinatha Putra yang menjadi sahabat terbaik dengan memberikan segala bentuk semangat, ide dan dukungan.
9. Jurusan Perbankan Syariah (S1) yang telah menjadi keluarga baru.
10. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis sangat menyadari bahwa karya tulis yang tidak sempurna ini masih banyak kekurangan maka dari itu diharapkan pembaca dapat memberi kritik, saran ataupun diskusi terkait dengan tema penelitian ini. Semoga karya tulis yang tidak sempurna ini mampu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi pembaca.

Malang, 18 Oktober 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

### HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK .....	xv
<i>ABSTRACT</i> .....	xvi
مستخلص البحث.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu .....	13
2.2 Kajian Teoritis .....	28
2.2.1 Keuangan Inklusif.....	28
2.2.2 Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) .....	33
2.2.3 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016.....	39

2.2.4 Indikator Keuangan Inklusif .....	43
2.2.5 Perbankan Syariah .....	45
2.2.6 Bank Umum Syariah.....	46
2.2.7 Unit Usaha Syariah .....	50
2.2.8 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.....	54
2.2.9 Profitabilitas.....	56
2.3 Kajian Keislaman .....	59
2.4 Kerangka Konseptual .....	62
2.5 Hipotesis Penelitian.....	63
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	66
3.2 Lokasi Penelitian .....	66
3.3 Populasi dan Sampel .....	66
3.4 Teknik Pengambilan Sampel.....	67
3.5 Data dan Sumber Data.....	67
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	68
3.7 Variabel Penelitian .....	69
3.7.1 Variabel independen .....	69
3.7.2 Variabel dependen (Profitabilitas (Y)) .....	71
3.8 Analisis Data .....	73
3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	73
3.8.2 Analisis Uji Asumsi Dasar.....	73
3.8.3 Analisis Uji Asumsi Klasik.....	74
3.8.4 Analisis Regresi Linear Berganda .....	76
3.8.5 Analisis Uji Beda K Sampel Independen .....	77
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Hasil Penelitian.....	78
4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	78

4.1.2 Uji Statistik Deskriptif.....	85
4.1.5 Uji Asumsi Dasar.....	87
4.1.6 Uji Asumsi Klasik.....	89
4.1.7 Uji Regresi Linear Berganda .....	93
4.1.8 Uji Beda K Sampel Independen ( <i>One-way ANOVA</i> ).....	98
4.2 Pembahasan .....	101
4.2.1 Pengaruh rasio jumlah kantor per 100.000 penduduk dewasa ( $X_1$ ) terhadap profitabilitas (Y).....	102
4.2.2 Pengaruh rasio jumlah rekening tabungan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_2$ ) terhadap profitabilitas (Y) .....	104
4.2.3 Pengaruh rasio jumlah rekening pembiayaan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_3$ ) terhadap profitabilitas (Y).....	105
4.2.4 Pengaruh persentase penyaluran pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan ( $X_4$ ) terhadap profitabilitas (Y) .....	107
4.2.5 Perbandingan inklusivitas keuangan berdasarkan rasio jumlah kantor per 100.000 penduduk dewasa ( $X_1$ ) pada perbankan syariah.....	108
4.2.6 Perbandingan inklusivitas keuangan berdasarkan rasio jumlah rekening tabungan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_2$ ) pada perbankan syariah .....	110
4.2.7 Perbandingan inklusivitas keuangan berdasarkan rasio jumlah rekening pembiayaan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_3$ ) pada perbankan syariah ...	110
4.2.8 Perbandingan inklusivitas keuangan berdasarkan persentase penyaluran pembiayaan UMKM per total pembiayaan ( $X_4$ ) pada perbankan syariah...	111
4.3 Kajian Keislaman .....	114
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	117
5.2 Saran.....	118

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu .....	18
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel .....	72
Tabel 4.1 Nama Perusahaan Bank Umum Syariah .....	78
Tabel 4.2 Nama Perusahaan Unit Usaha Syariah .....	79
Tabel 4.3 Nama Perusahaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah .....	80
Tabel 4.4 Uji Statistik Deskriptif .....	86
Tabel 4.5 Uji Normalitas .....	88
Tabel 4.6 Uji Homogenitas .....	89
Tabel 4.7 Uji Multikolinearitas .....	90
Tabel 4.8 Uji Heteroskedastisitas .....	91
Tabel 4.9 Kaidah Keputusan Durbin Watson .....	92
Tabel 4.10 Uji Autokorelasi .....	93
Tabel 4.11 Uji Koefisien Determinasi .....	94
Tabel 4.12 Uji F ( <i>Simultan Test</i> ) .....	95
Tabel 4.13 Uji T ( <i>Partial Test</i> ) .....	97
Tabel 4.14 Uji <i>One-way</i> ANOVA .....	98
Tabel 4.15 Tukey HSD dan Bonferonni ( $X_1$ ) .....	99
Tabel 4.16 Tukey HSD dan Bonferonni ( $X_2$ ) .....	99
Tabel 4.17 Tukey HSD dan Bonferonni ( $X_3$ ) .....	100
Tabel 4.18 Tukey HSD dan Bonferonni ( $X_4$ ) .....	101

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Indeks Inklusi Keuangan .....	4
Gambar 1.2 Grafik Indeks Inklusi Keuangan Sektoral .....	5
Gambar 2.1 Pelaku Keuangan Inklusif .....	32
Gambar 2.2 Hasil Survei .....	34
Gambar 2.3 Pilar SNKI .....	35
Gambar 2.4 Kerangka Konseptual .....	62
Gambar 2.5 Hipotesis Penelitian .....	65

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data Mentah Penelitian
- Lampiran 2 Hasil Output SPSS Versi 16.0
- Lampiran 3 Biodata Peneliti
- Lampiran 4 Bukti Konsultasi



## ABSTRAK

Uzhma, Khalifatul. 2017. Skripsi. Judul: “Analisis Pengaruh Keuangan Inklusif terhadap Profitabilitas pada Perbankan Syariah di Indonesia”.

Pembimbing : Esy Nur Aisyah, SE., MM.

Kata Kunci : Keuangan Inklusif, Profitabilitas, Perbankan Syariah

---

Keuangan inklusif merupakan kebijakan untuk menyediakan akses jasa atau layanan keuangan formal secara merata. Pemerintah Indonesia menetapkan Strategi Nasional Keuangan Indonesia sebagai pedoman untuk menjalankan kegiatan dalam upaya meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2016. Perbankan syariah memiliki peran besar dalam mencapai keuangan inklusif.

Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif. Lokasi penelitian pada perbankan syariah di Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *sampling* jenuh. Penelitian dilakukan sejak bulan Oktober 2014-Juni 2017. Variabel independen terdiri dari rasio jumlah kantor per 100.000 penduduk dewasa ( $X_1$ ), rasio jumlah rekening tabungan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_2$ ), rasio jumlah rekening pembiayaan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_3$ ) dan persentase penyaluran pembiayaan UMKM per total pembiayaan ( $X_4$ ). Variabel dependen adalah profitabilitas yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA). Analisis data menggunakan uji regresi linear berganda dan uji beda K sampel independen (*One-way ANOVA*)

Hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh simultan terhadap variabel dependen. Secara parsial, rasio jumlah kantor per 100.000 penduduk dewasa berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas, rasio jumlah rekening tabungan per 1.000 penduduk dewasa berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas, rasio jumlah rekening pembiayaan per 1.000 penduduk dewasa dan persentase penyaluran pembiayaan UMKM per total pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hasil uji *one-way ANOVA* menunjukkan bahwa ketiga jenis perbankan syariah adalah berbeda secara signifikan sehingga dapat dibandingkan.

## ABSTRACT

Uzhma, Khalifatul. 2017. Thesis. Title: “The Analysis of Financial Inclusion Effects Towards Syaria Banking Profitability in Indonesia”.

Advisor : Esy Nur Aisyah, S.E., MM.

Keywords : Financial Inclusion, Profitability, Syaria Banking

---

Financial inclusion is policy that provides equal access to formal financial service. Indonesian government formally use *National Strategy of Indonesian Finance* as reference to run any activities to improve financial inclusion in Indonesia that is ruled in *Presidential Regulation* Number 82 2016. Syaria banking has big influence in achieving financial inclusion.

This study is included in quantitative research. This research is conducted in Indonesian syaria banks. The sampling method that is used is saturated sampling. This study was conducted since October 2014 up to June 2017. Independent variable consists of the total office ratio per 100.000 adult citizens ( $X_1$ ), bank account books ratio per 1.000 adult citizens ( $X_2$ ), the number of paid bank account ratio per 1.000 adult citizens ( $X_3$ ) and the percentage of UMKM funding distribution per total funding ( $X_4$ ). Dependent variable is profitability that is measured by *Return on Asset* (ROA). The data analysis involves double linear regression test and distinguished test on independent K sample (*One way ANOVA*).

Double linear regression test showed that all independent variables simultaneously affected dependent variables. Partially, the total office ratio per 100.000 adult citizens significantly gave bad impacts towards profitability, bank accounts ratio per 1.000 adult citizens significantly give positive influences towards profitability, ratio of paid bank accounts per 1.000 adult citizens and percentage of UMKM funding distribution per total funding did not affect significantly towards profitability. The result of *one-way ANOVA* test showed that three kinds of syaria banking were significantly different. Therefore, it was easy to be distinguished from one to another.

## مستخلص البحث

الموضوع: التحليل عن تأثير التمويل الشامل على الربحية في المصرفية بإندونيسيا  
المشرفة: أيسي نور عائشة الماجستير  
المفتاح: التمويل الشامل، الربحية، المصرفية.

كان التمويل الشامل هي النظام في تجهيز الوصول إلى الخدمة ويكون خدمة التمويل الرسمي بالتساوي. وحكومية الإندونيسية تستخدم الاستراتيجية الوطنية لتمويل الإندونيسية كالتمسك في تأدية الأنشطة لترقية التمويل الشامل بإندونيسيا المقرر في نظم رئيس الجمهورية اندونيسيا رقم 82 سنة 2016. المصرفية لها دور كبير في وصول إلى التمويل الشامل.

نوع البحث المستخدمة هي البحث الكمي. مكان البحث هي المصرفية بإندونيسيا. التكنيك في أخذ عينات البحث بتكنيك سمفلينج المشبعة. بدأ البحث من شهر أكتوبر 2014 حتى شهر مايو 2017. المتغير المستقل يتكون من نسبة عدد الديوان لكل 100.000 سكان البالغين ( $X_1$ ) ونسبة عدد حساب التوفير لكل 1000 سكان البالغين ( $X_2$ ) ونسبة عدد حساب التمويل لكل 1000 سكان البالغين ( $X_3$ ) وكذلك النسبة المئوية في توزيع التمويل UMKM لكل جملة التمويل ( $X_4$ ). المتغير التابع هي الربحية تقاس ROA تحليل البيانات باستخدام اختبار الانحدار الخطي المثنى وكذلك اختبار الخلاف K عينات المستقل.

نتيجة الاختبار الانحدار الخطي المثنى تدل على أن جميع عينات المستقل له أثر متزامن على المتغير المستقل. بالجزئية علي أن نسبة عدد الديوان لكل 100.000 سكان البالغين تتأثر هام بسليبي على الربحية. ونسبة عدد حساب التوفير لكل 1000 سكان البالغين تتأثر هام بإيجابي على الربحية. ونسبة عدد حساب التمويل لكل 1000 سكان البالغين و نسبة المئوية في توزيع التمويل UMKM لكل جملة التمويل لا تتأثر هام على الربحية. نتيجة الاختبار one-way ANOVA تدل على أن الجنس الثالث من المصرفية .

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang dikeluarkan pada tanggal 7 September 2016 telah menjadi landasan hukum dan pedoman dalam melaksanakan program keuangan inklusif di Indonesia.

Bank Indonesia dalam website resmi [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) menyatakan pada dasarnya kebijakan keuangan inklusif adalah suatu bentuk pendalaman layanan keuangan (*financial service deepening*) yang ditujukan kepada masyarakat *in the bottom of the pyramid* untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman (*keeping*), transfer, menabung maupun pinjaman dan asuransi. Hal ini dilakukan tidak saja menyediakan produk dengan cara yang sesuai tapi dikombinasikan dengan berbagai aspek.

Keuangan inklusif telah menjadi agenda penting di tingkat internasional maupun nasional. Keuangan inklusif menjadi sorotan setelah krisis tahun 2008 yang menimbulkan dampak negatif kepada warga dengan pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, kelompok disabilitas, buruh dan masyarakat pinggiran yang selanjutnya disebut kelompok piramida bagian bawah. Sejak saat itu banyak fora-fora internasional yang memfokuskan kegiatannya pada keuangan inklusif seperti World Bank, CGAP, BIS, APEC, *Asian Developmen*

*Bank, Alliance for Financial Inclusion, Financial Action Task Force* termasuk Indonesia dan negara berkembang lainnya (BKI, 2014).

Kunjuangan Ratu Maxima mewakili Perserikatan Bangsa Bangsa selaku *United Nations Secretary General's Special Advocate (UNSGSA) for Inclusive Finance for Development* ke Indonesia pada tanggal 30 Agustus - 1 September 2016 dalam rangka membicarakan keuangan inklusif yang ada di Indonesia. Dalam kapasitasnya, Ratu Maxima memuji bahwa Indonesia memiliki peran yang sangat besar di dunia internasional dalam promosi keuangan inklusif.

Pelaksanaan keuangan inklusif di Indonesia dimulai tahun 2010 melalui Gerakan Indonesia Menabung dan peluncuran Tabunganku. Pada bulan Juni 2012 dipilih cara komprehensif dengan menyusun suatu strategi nasional yang disusun bersama antara Bank Indonesia, kantor Wakil Presiden (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/TNP2K) dan Kementerian Keuangan yang disebut dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Kondisi geografis Indonesia membuat biaya pembukaan cabang-cabang bank lebih mahal. Selain itu, tingkat penetrasi *mobile banking* tergolong tinggi, bahkan pada masyarakat miskin dan rentan. Berdasarkan kondisi demikian, Bank Indonesia mengadakan sebuah proyek percontohan mengenai *branchless banking* pada Mei – November 2013, yang memperkenalkan konsep transaksi keuangan tanpa mengharuskan nasabah pergi ke kantor cabang bank tertentu, namun dapat melakukannya melalui agen atau telepon genggam. Pada tahun 2014, OJK mengeluarkan regulasi LAKU PANDAI (Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif - *Branchless banking*), Perbedaan utama antara LKD dan LAKU PANDAI adalah

LKD dilandaskan pada uang elektronik yang tidak secara langsung terhubung dengan rekening bank, sedangkan LAKU PANDAI adalah *branchless banking* dimana nasabah harus memiliki rekening bank. OJK juga mengeluarkan regulasi LAKU MIKRO yang menyediakan pelayanan sekali jalan (*one-stop service*) yang memungkinkan nasabah untuk memiliki simpanan, perlindungan asuransi mikro, reksadana mikro, pendanaan mikro, dan angsuran emas dengan persyaratan yang mudah. Ada pula rekening simpanan jenis baru yang dikeluarkan OJK, yakni Simpanan Pelajar atau Simpel. OJK juga menetapkan hari Rabu pertama setiap bulan menjadi Hari Menabung (Soejachmoen, 2016).

Implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang terpadu diperlukan untuk mencapai target keuangan inklusif yaitu persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) pada akhir tahun 2019. Adanya target tersebut memberi dorongan kuat pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk semakin meningkatkan tingkat *keuangan* inklusif Indonesia.

Pada *Global Findex* 2014, hanya 36% penduduk dewasa Indonesia yang telah memiliki rekening di lembaga keuangan formal. Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia sebesar 81 %, Singapore sebesar 96% dan Thailand sebesar 78% maka Indonesia adalah negara yang memiliki keuangan inklusif sangat rendah.

Pemerintah Indonesia memilih Strategi Nasional Keuangan Inklusif sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia. Strategi Nasional Keuangan

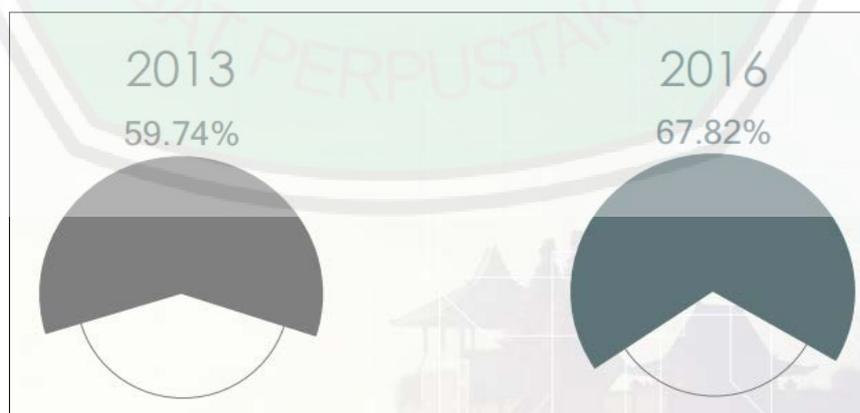
Inklusif telah dibentuk sejak tahun 2012 oleh Bank Indonesia, Kantor Wakil Presiden (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K) dan Kementerian Keuangan namun dianggap belum mendapatkan hasil yang maksimal.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang dikeluarkan pada 7 September 2016 oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo telah membuktikan bahwa pemerintah Indonesia semakin konsen dan serius dalam meningkatkan keuangan inklusif. Peraturan tersebut dapat dijadikan satu bentuk landasan hukum yang sah sebagai pedoman pelaksanaan keuangan inklusif di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan membuktikan bahwa Indonesia telah mengalami peningkatan keuangan inklusif yang cukup baik tingkat nasional pada Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016.

**Gambar 1.1**

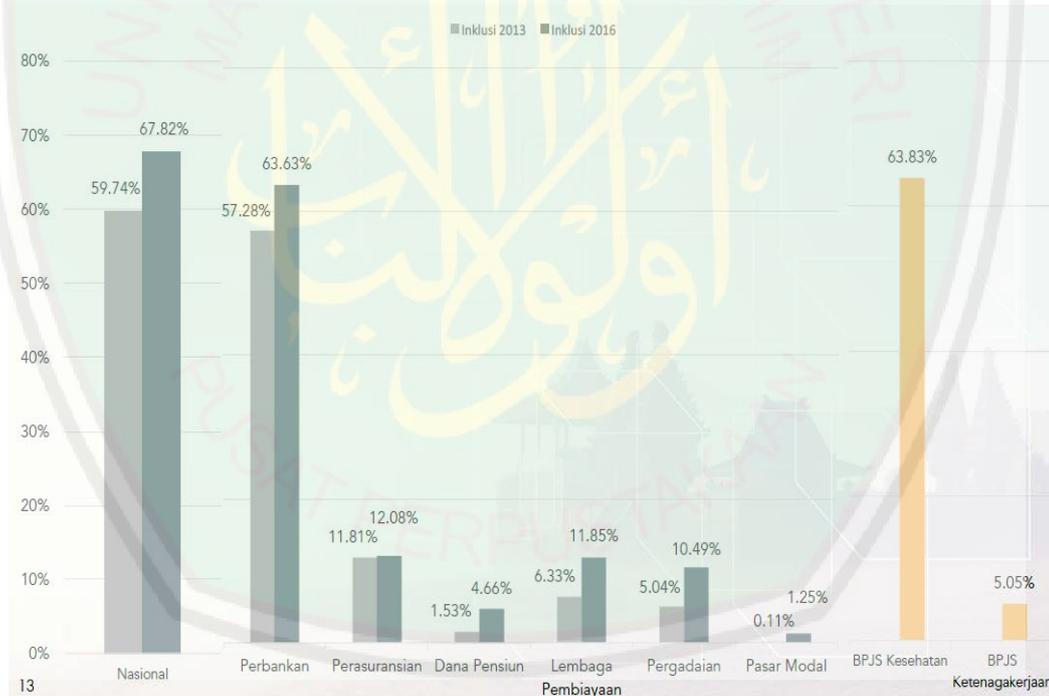
**Indeks Inklusi Keuangan (2013-2016)**



Sumber: SNLIK, 2016

Tahun 2013 sebesar 59,74% penduduk dewasa Indonesia yang memiliki rekening dan pada tahun 2016 meningkat sebesar 8,08% menjadi 67,82%. Keuangan inklusif akan terus meningkat apabila seluruh masyarakat, pemerintah dan pihak-pihak lain bekerja sama. Kenaikan prosentase ini memaknai bahwa masyarakat Indonesia telah melakukan suatu perubahan yang baik dalam rangka mengenali dan menggunakan jasa keuangan formal perbankan.

**Gambar 1.2**  
**Grafik Indeks Inklusi Keuangan Sektoral**



Sumber: SNLIK, 2016

Perbankan berada di urutan tertinggi dalam indeks inklusi keuangan dalam sektor keuangan. Sebesar 57,28% tahun 2013 dan meningkat menjadi 63,63% tahun 2016. Meskipun baru dilaksanakan survei pada tahun 2016 saja, lembaga keuangan perbankan konvensional maupun perbankan syariah

membuktikan lebih mampu memberikan akses keuangan kepada masyarakat di *bottom line* agar dapat menggunakan jasa keuangan formal dibanding lembaga keuangan lainnya.

Pengukuran keuangan inklusif dapat menggunakan indikator keuangan inklusif yang disebut dengan indikator multidimensi. Sarma (2012) mengukur keuangan inklusif menggunakan *Index of Financial Inclusion* (IFI) dengan tiga dimensi dasar yaitu *banking penetration* (BP), *banking service* (BS) dan *banking usage* (BU). Roa (2015) menggunakan tiga dimensi yaitu akses, penggunaan dan kualitas yang digunakan untuk menggambarkan lengkap sifat dan karakteristik keuangan inklusif di suatu negara. Hidayah (2016) melakukan penelitian dengan menggunakan dimensi akses dan penggunaan untuk mengukur inklusi keuangan. Dengan keterbatasan data yang tersedia, maka penelitian ini mengukur keuangan inklusif menggunakan dimensi akses dan penggunaan.

Keuangan inklusif mempunyai berbagai dampak bagi siapapun, melalui program yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan selaku anggota Kelompok Kerja Dewan Nasional Keuangan Inklusif terbukti bahwa program-program yang diluncurkan sebagai langkah meningkatkan tingkat keuangan inklusif di Indonesia memiliki pengaruh terhadap profitabilitas yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA). Hal tersebut dilandasi dari hasil penelitian Nthambi (2015) menemukan hasil bahwa *financial inclusion* di Kenya berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Sarah (2016) yang menyatakan bahwa sebelum dan sesudah adanya *branchless banking*, *Return On Asset* (ROA) mengalami perbedaan secara signifikan. Dengan adanya hasil

penelitian di atas, maka penelitian ini ingin meneliti tentang pengaruh keuangan inklusif terhadap profitabilitas yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA) pada perbankan syariah.

*Return On Asset* adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas yang diambil dari laporan keuangan bank syariah. Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien. Semakin tinggi profitabilitas bank syariah maka semakin baik. Variabel CAR, FDR, NPF dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA (Widodo, 2015). Penelitian ini menggunakan profitabilitas yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA) sebagai variabel dependen karena *Return On Asset* (ROA) merupakan alat yang tepat untuk mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan termasuk perbankan syariah.

Perbankan syariah memiliki potensi besar dalam mengimplementasikan keuangan inklusif di Indonesia yang dibuktikan dengan analisis rasio keuangan menunjukkan kinerja dan kondisi keuangan yang baik (Nengsih, 2015). Munculnya perbankan dengan sistem syariah memberi nilai lebih untuk masyarakat yang membutuhkan ketenangan spiritual dalam bermuamalah.

Perbankan syariah terbagi menjadi tiga jenis yaitu Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Keikutsertaan ketiga jenis bank tersebut dalam melaksanakan program keuangan inklusif tentu saja layak untuk diapresiasi. Selama ini Bank Umum Syariah lebih unggul berdasarkan jumlah kantornya, namun jika dibandingkan melalui aspek lain maka

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mampu mengalahkan Bank Umum Syariah. Maka dari itu penelitian ini ingin menggali sejauh mana Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam menyediakan akses kepada masyarakat *in the bottom line of pyramid*. Keberadaan jumlah kantor merupakan salah satu bentuk pelayanan keuangan untuk masyarakat. Hasil penelitian dari Damajanti dkk.,(2014) yaitu peningkatan jumlah kantor Bank Umum Syariah mendominasi dan lebih agresif perkembangan kinerjanya dibanding dengan Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan menurut Hasan (2011) jumlah kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Bank Umum Syariah tidak dapat dibandingkan.

Dalam rangka menyalurkan pembiayaan kepada UMKM pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Muflih (2012), Nugroho (2011) dan Ernawati (2016) mengatakan Bank Umum Syariah lebih unggul dari lainnya. Kustanti (2016) dan Haqiqi (2016) menemukan hasil bahwa Unit Usaha Syariah lebih unggul dibandingkan dengan Bank Umum Syariah. Sedangkan Almustofa (2011) dan Arifin (2013) membuktikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah lebih mampu menjangkau bisnis mikro dibandingkan bank komersil lainnya.

Salah satu tujuan dari keuangan inklusif adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat agar mendapatkan akses jasa atau layanan keuangan formal secara merata. Memberikan kemudahan dapat diartikan sebagai upaya membebaskan orang lain dari berbagai macam kesusahan yang dihadapi. Dalam

ajaran agama Islam telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana dalam hadist berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Artinya:

Dari Abu Hurairah R.A., Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat” (HR. Muslim No. 2699).

Dari fenomena yang terjadi, hasil penelitian terdahulu dan *gap research* yang muncul, maka peneliti membuat penelitian dengan judul “**Analisis Pengaruh Keuangan Inklusif terhadap Profitabilitas pada Perbankan Syariah di Indonesia**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh keuangan inklusif berdasarkan dimensi akses yang meliputi rasio jumlah kantor per 100.000 penduduk dewasa ( $X_1$ ) dan dimensi penggunaan meliputi rasio jumlah rekening tabungan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_2$ ), rasio jumlah rekening pembiayaan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_3$ ), persentase penyaluran pembiayaan UMKM per

total pembiayaan terhadap profitabilitas (Y) yang diukur dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA)?

2. Bagaimana perbandingan keuangan inklusif berdasarkan dimensi akses yang meliputi rasio jumlah kantor per 100.000 penduduk dewasa ( $X_1$ ) dan dimensi penggunaan meliputi rasio jumlah rekening tabungan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_2$ ), rasio jumlah rekening pembiayaan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_3$ ), persentase penyaluran pembiayaan UMKM per total pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh keuangan inklusif berdasarkan dimensi akses yang meliputi rasio jumlah kantor per 100.000 penduduk dewasa ( $X_1$ ) dan dimensi penggunaan meliputi rasio jumlah rekening tabungan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_2$ ), rasio jumlah rekening pembiayaan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_3$ ), persentase penyaluran pembiayaan UMKM per total pembiayaan terhadap profitabilitas (Y) yang diukur dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA).
2. Untuk mengetahui perbandingan keuangan inklusif berdasarkan dimensi akses yang meliputi rasio jumlah kantor per 100.000 penduduk dewasa ( $X_1$ ) dan dimensi penggunaan meliputi rasio jumlah rekening tabungan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_2$ ), rasio jumlah rekening pembiayaan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_3$ ), persentase penyaluran pembiayaan UMKM per total pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan ilmu ekonomi dan memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang berkenaan dengan keuangan inklusif. Kemudian dari hasil penelitian ini akan dikaitkan dengan teori-teori yang sudah ada untuk membuktikan kebenaran teori tersebut.

Bagi penulis, penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat melalui rangkaian proses untuk mendapatkan gelar sarjana strata 1 ekonomi (SE). Sebagai wadah untuk mengaplikasikan teori dari segala mata kuliah yang telah diampu ke dalam praktik lapang. Sebagai sarana penelitian untuk mengembangkan ilmu yang dimiliki, sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Salah satu cara agar mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan jika dihadapkan masalah yang sedang atau akan terjadi dengan menggunakan pisau yang tepat.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi maupun acuan bagi peneliti selanjutnya maupun pembaca dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai keuangan inklusif pada masa yang akan datang serta diharapkan dapat memotivasi agar dapat melakukan pengembangan penelitian yang lebih baik pada masa yang akan datang mengenai masalah keuangan inklusif.

### 2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, bahan evaluasi dan bahan pertimbangan mengenai keefektifan regulasi penerapan keuangan inklusif di Indonesia. Pemerintah dapat memaksimalkan program keuangan inklusif yang telah diluncurkan sehingga membantu pemerataan ekonomi di Indonesia.

Bagi perbankan syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, bahan evaluasi dan bahan pertimbangan untuk perusahaan-perusahaan pada perbankan syariah agar mengetahui kondisi inklusivitas keuangannya sehingga dapat lebih memaksimalkan upaya-upaya untuk lebih mendekati diri kepada sasaran masyarakat yang benar-benar membutuhkan ketersediaan akses jasa atau layanan keuangan formal. Penerapan keuangan inklusif dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan profitabilitas perbankan syariah.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Nthambi (2015) menemukan hasil bahwa *financial inclusion* di Kenya berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Sarah (2016) yang menyatakan bahwa sebelum dan sesudah adanya *branchless banking*, *Return On Asset* (ROA) mengalami perbedaan secara signifikan.

Untuk mengukur inklusi keuangan perlu adanya indikator-indikator yang terukur seperti yang telah ditetapkan oleh *Global Partnership for Financial Inclusion* (GPII) yaitu akses ke layanan keuangan, penggunaan jasa keuangan dan kualitas produk dan pelayanan. Indikator yang diusulkan untuk digunakan pada tahun 2016 adalah *adults using digital payment*, *payment using mobile phone (from access)*, *payment using internet*, *payment using bank card*, *payment using account*, *digital payment to or from enterprise*, *debit card ownership*, *enterprise points of service*. Semua indikator tersebut mengacu pada dimensi penggunaan layanan keuangan formal. Dalam penelitian internasional, Sarma (2012) membagi *Index of Financial Inclusion* (IFI) menjadi tiga dimensi yaitu *banking penetration* (BP), *banking service* (BS) dan *banking usage* (BU). Roa (2015) menggunakan tiga dimensi yaitu akses, penggunaan dan kualitas. Haldar et al., (2016) mengukur inklusi keuangan dengan dua dimensi yaitu akses dan penggunaan. Ong et al., (2016) menyebutkan bahwa indikator inklusi keuangan dapat diukur dengan dimensi akses yaitu jumlah kantor cabang, kedalaman dan

efisiensi intermediasi. Rojas dan Suarez (2016) menyebutkan bahwa persentase orang dewasa yang memiliki akun di lembaga keuangan formal, penghematan, perilaku pinjaman, kepemilikan akun (rekening), tabungan dan pinjaman dapat digunakan untuk mengukur inklusi keuangan. Di Indonesia, Hidayah (2016) melakukan penelitian dengan menggunakan dimensi akses yaitu ketersediaan kantor dan dimensi penggunaan yaitu penggunaan produk pembiayaan untuk mengukur inklusi keuangan. Sedangkan Sanjaya dan Nursechafia (2016) menggunakan dimensi akses, availabilitas dan penggunaan untuk indikator inklusi keuangan. Peraturan Presiden RI No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif juga menetapkan indikator inklusi keuangan menjadi tiga dimensi yaitu akses, penggunaan dan kualitas. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur inklusi keuangan adalah dimensi akses dan penggunaan seperti yang telah dipilih oleh Hidayah (2016).

Setiap dimensi mempunyai indikator yang dapat mewakili dimensi tersebut. Sarma (2012) menjelaskan bahwa pemilihan indikator setiap dimensinya tergantung dengan ketersediaan data. Dimensi akses dan penggunaan juga mempunyai indikator-indikator yang dapat diukur dan dapat mewakili dimensinya. Roa (2015) menggunakan cabang bank dan non-bank entitas (lembaga *microfinance*, tabungan bank dan koperasi, pengembangan bank, dll), ATM dan *counter* sebagai indikator dimensi akses. Haldar et.al (2016) menggunakan jumlah cabang dan ATM per 1.000 km<sup>2</sup> untuk mengukur akses penetrasi geografis perbankan serta jumlah cabang dan ATM per 100.000 penduduk dewasa untuk akses penetrasi demografis perbankan. Purba (2016)

menggunakan indikator ketersediaan akses hal ini berkaitan dengan ketersediaan layanan perbankan ditunjukkan dengan jumlah outlet bank atau nomor ATM yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Primadani (2016) dan Mandala (2016) mengukur dimensi akses dengan menggunakan jumlah kantor bank dan ATM. Peraturan Presiden RI No. 82 Tahun 2016 tentang SNKI menyebutkan indikator pengukuran dimensi akses adalah jumlah kantor layanan keuangan formal per 100.000 penduduk dewasa, jumlah mesin ATM/EDC/Mobile POS lainnya per 100.000 penduduk dewasa dan jumlah agen layanan keuangan per 100.000 penduduk dewasa. Dalam penelitian ini hanya menggunakan jumlah kantor per 100.000 penduduk dewasa (Halдар et al., 2016).

Indikator untuk mengukur dimensi penggunaan Efobi dkk (2016) menggunakan pinjaman yang diberikan lembaga keuangan formal. Halдар et al., (2016) menggunakan jumlah rekening deposito dan kredit serta besarnya pinjaman. Rojas dan Suarez (2016) juga mengatakan bahwa pinjaman, rekening, jumlah tabungan dan pinjaman dapat digunakan sebagai indikator dimensi penggunaan. Peraturan Presiden RI No. 82 Tahun 2016 tentang SNKI menyebutkan indikator pengukuran dimensi penggunaan adalah jumlah rekening tabungan di lembaga keuangan formal per 1.000 penduduk dewasa, jumlah rekening kredit atau pembiayaan di lembaga keuangan formal per 1.000 penduduk dewasa, jumlah rekening uang elektronik terdaftar (*registered*) pada agen Layanan Keuangan Digital (LKD), persentase kredit atau pembiayaan UMKM terhadap total kredit atau pembiayaan di lembaga keuangan formal, jumlah rekening kredit atau pembiayaan UMKM di lembaga keuangan formal per 1.000 penduduk

dewasa dan jumlah penerima bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai. Menyesuaikan dengan data yang tersedia dalam penelitian ini maka dimensi penggunaan diwakilkan dengan indikator jumlah rekening tabungan di lembaga keuangan formal per 1.000 penduduk dewasa dan jumlah rekening kredit atau pembiayaan di lembaga keuangan formal per 1.000 penduduk dewasa (Haldar et al., 2016) serta dengan menambah kredit atau pembiayaan UMKM karena Garg dan Agarwal (2014) mengatakan bahwa penyediaan pembiayaan UMKM adalah media terbaik untuk mencapai pertumbuhan inklusif.

Keberadaan jumlah kantor merupakan salah satu bentuk pelayanan keuangan untuk masyarakat. Hasil penelitian dari Damajanti dkk.,(2014) yaitu peningkatan jumlah kantor Bank Umum Syariah mendominasi dan lebih agresif perkembangan kinerjanya dibanding dengan Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan menurut Hasan (2011) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki prosentase yang sama dengan Bank Umum Syariah yaitu 100% atas perkembangan jumlah kantor. Jadi, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Bank Umum Syariah tidak dapat dibandingkan. Puteri (2015) mengatakan pada tahun 2010-2013 pertumbuhan kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak secepat Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Bank Umum Syariah lebih unggul dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam pengadaan jumlah kantor sehingga masyarakat lebih mudah untuk mengakses kantor Bank Umum Syariah daripada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Kedekatan masyarakat yang dilihat melalui banyaknya rekening nasabah, Yasri (2012) mengatakan besaran tabungan dan aksesibilitas mereka pada bank konvensional memperjelas keberadaan dan pentingnya bank syariah membina kedekatan dengan nasabah itu sendiri. Nasabah BUS/UUS sangat potensial karena pendapatannya mereka yang relatif besar dan kebutuhan dana mereka juga relatif besar. Sedangkan untuk BPRS akan mengalami kesulitan dalam membina kedekatan dengan nasabah itu sendiri karena nasabah sulit pindah dari konvensional kepada BPRS.

Dalam rangka menyalurkan pembiayaan kepada UMKM, Muflih (2012) menegaskan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah belum dapat mengimbangi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Nugroho (2012) menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah lebih baik dari Unit Usaha Syariah. Ernawati (2016) mengatakan Bank Umum Syariah tertinggi atas pembiayaan UMKM jika dibandingkan dengan yang lain. Namun, Kustanti (2016) dan Haqiqi (2016) menemukan hasil bahwa Unit Usaha Syariah lebih unggul dibanding Bank Umum Syariah dalam penyaluran pembiayaan sektor UMKM. Hasil penelitian Almustofa (2011) menghasilkan antusiasme masyarakat yang memanfaatkan lembaga keuangan mikro karena lebih sesuai dengan keyakinannya, transparan dan menyentuh langsung ke para pelaku di tingkat bawah. Husaeni (2017) menunjukkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mampu menjalankan fungsi intermediasi dengan baik, penyaluran pembiayaan tumbuh seiring dengan pertumbuhan dana pihak ketiga. Arifin (2013) membuktikan Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah lebih mampu menjangkau bisnis mikro dibandingkan bank komersil lainnya.

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel atau Fokus Penelitian	Metode atau Analisis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Almustofa, Mohammad Imsin. (2011). <i>Usaha Mikro dan Menengah yang Didukung Lembaga Keuangan dengan Pola Syariah sebagai Modal Kegiatan Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mendorong kelompok UMKM dan lembaga keuangan mikro pola syariah agar bisa meningkatkan daya saing daerah.	Metode deskriptif kualitatif penelitian pengembangan	Lembaga keuangan dengan pola syariah seperti peran yang diambil oleh Baitul Maal Wattamwil (BMT) pondok pesantren Sidogiri dalam meningkatkan pemberdayaan usaha kecil menengah adalah riil terjadi. Peran Baitul Maal Wattamwil (BMT) pondok pesantren Sidogiri merupakan bentuk kegiatan lembaga keuangan ekonomi mikro yang layak untuk di jadikan alternatif model untuk di kembangkan dalam meningkatkan pemberdayaan usaha kecil menengah di masa yang akan datang. Ini terbukti dari antusiasme masyarakat yang memanfaatkan lembaga keuangan mikro ini karena lebih sesuai dengan keyakinannya, tranfaran dan menyentuh langsung ke para pelaku di tingkat bawah.
2.	Hasan. (2011). <i>Analisis Industri Perbankan Syariah di Indonesia.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis industri perbankan syariah di Indonesia.	Pendekatan Porter	Industri perbankan syariah berkembang pesat namun relatif kecil dibandingkan dengan perbankan nasional dan industri keuangan secara umum.
3.	Nugroho, Rino Adi., Muharam,	Penelitian ini bertujuan untuk	Metode Stochastic	Dalam pengujian analisis panel metode

	Harjum. (2011). <i>Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dengan Metode Stochastic Frontier Analysis Periode 2005-2009.</i>	menganalisis efisiensi produksi perbankan syariah industri di Indonesia khususnya Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah.	Frontier Analysis (SFA)	Stochastic Frontier Analysis (SFA) menggunakan fungsi produksi, variabel input yang secara signifikan dan berpengaruh positif terhadap total pembiayaan BUS dan UUS yaitu total simpanan dan biaya operasional, sedangkan biaya operasional lain berpengaruh positif tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap total pembiayaan BUS dan UUS.
4.	Muflih, Muhammad. (2012). <i>Komparasi Tingkat Pembiayaan Mudarabah pada BPRS dan BUS-UUS di Indonesia.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan tingkat pembiayaan mudarabah pada BPRS, BUS, UUS di Indonesia.	Metode kuantitatif korelasi	Studi ini membuktikan bahwa tingkat pembiayaan mudarabah di BPRS dan BUS-UUS tidak terlalu fantastis. Namun, pembiayaan mudarabah di BUS-UUS lebih baik dari BPRS. Dalam enam tahun (2005-2010) BPRS hanya mampu menjaga pembiayaan mudarabah rata-rata 6,2%, sedangkan BUS-UUS mampu mencapai level 19,1%. Kelemahan ini disebabkan oleh kurangnya dukungan otoritas perbankan, kurangnya pengalaman sumber daya manusia, dan lain-lain.
5.	Sarma, Mandira. (2012). <i>Index of Financial Inclusion – A Measure of Financial Sector Inclusiveness.</i>	Tulisan ini untuk mengisi celah ini dengan mengusulkan sebuah <i>index financial inclusion (IFI)</i> .	Metode kuantitatif.	Mengusulkan <i>Index of Financial Inclusion (IFI)</i> . Indeks yang diusulkan mudah untuk menghitung dan sebanding.
6.	Yasri. (2012). <i>Analisis Faktor Penentu Menjadi</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis	Metode Analytical Hierachy	Penelitian menemukan bahwa kedua segmen mempertimbangkan kepatuhan pada aturan

	<i>Nasabah Bank Syariah: (Perbandingan Segmen BPR Syariah dan Bank Umum/Unit Usaha Syariah di Sumatera Barat.</i>	faktor-faktor yang menentukan segmen nasabah syariah BPR dan Bank Umum Syariah.	Process (AHP)	Islam dan faktor ini menduduki peringkat pertama. Namun, kedekatannya dengan faktor lokasi, keuntungan finansial, dan kualitas layanan memiliki peringkat yang berbeda pentingnya antara dua segmen.
7.	Arifin, Johan. (2013). <i>Hubungan Hukum Kemitraan dalam Linkage Program Perbankan Syariah.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk memberdayakan dan memberikan akses terhadap modal yang kecil dan UMKM melalui keterlibatan partisipasi dalam bidang keuangan industri.	Metode kualitatif	Fakta bahwa lembaga keuangan mikro BPR / S atau Syari'ah suka Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) terkadang bermasalah dalam memobilisasi sektor publik dana. Sementara bank umum di sisi lain cenderung memiliki kelebihan dana yang umum sektor (over likuiditas) namun ruang terbatas pada usaha mikro mencapai pergerakannya.
9.	Garg, Sonu and Agarwal, Paul. (2014). <i>Financial Inclusion in India – a Review of Initiatives and Achievements.</i>	Studi ini berfokus pada pendekatan yang diadopsi oleh berbagai bank India untuk mencapai tujuan akhir inklusi keuangan untuk pertumbuhan inklusif di India dan analisis kemajuan dan pencapaian di masa lalu.	Metode kualitatif.	Meski cukup banyak usaha yang dilakukan oleh semua pemegang saham yaitu regulator, pemerintah, Lembaga Keuangan dan lain-lain, usaha tersebut tidak menghasilkan hasil seperti yang diharapkan. Untuk mencapai target FIP, ADB perlu memberdayakan UMKM melalui penyediaan dana yang tepat waktu dan memadai karena UMKM merupakan media terbaik untuk mencapai pertumbuhan inklusif yang menghasilkan permintaan dan konsumsi lokal, memberikan lapangan kerja bagi jutaan orang yang lebih segar.
11.	Ntambhi, Kalunda Elizabeth. (2015).	Penelitian ini bertujuan untuk	Analisis regresi	Penelitian ini menyimpulkan bahwa

	<i>Financial Inclusion, Bank Stability, Bank Ownership and Financial Performance of Commercial Banks in Kenya.</i>	menyelidiki dampak penyertaan keuangan pada kinerja keuangan bank, menentukan bagaimana stabilitas bank sebagai mediator dan kepemilikan bank sebagai moderator mempengaruhi pengaruh penyertaan keuangan pada kinerja keuangan bank umum di Kenya dan akhirnya menetapkan apakah efek gabungan dari stabilitas bank dan penyertaan keuangan terhadap kinerja bank lebih besar dari efek individual penyertaan keuangan terhadap kinerja bank.		efek gabungan dari inklusi keuangan, NPL dan Z Skor lebih besar daripada efek individual penyertaan keuangan terhadap kinerja keuangan dari bank komersial di Kenya. Dari temuan penelitian itu direkomendasikan agar bank umum harus berperan aktif dalam meningkatkan inklusi keuangan sebagaimana adanya mendukung motif keuntungan. Akhirnya penelitian tersebut merekomendasikan agar inklusi keuangan harus dilakukan diatasi dengan faktor lain saat memeriksa pengaruhnya terhadap kinerja keuangan
12.	Puteri, Hesi Eka. (2015). <i>Kontribusi BPRS Merealisasi Financial Inclusion dalam Penguatan Ekonomi Lokal: Evaluasi Penguatan Strategi.</i>	Untuk mengupas indikasi financial inclusion di pedesaan Indonesia	Metode kualitatif	Kontribusi BPR dalam merealisasikan wacana financial inclusion sudah terlihat jauh sebelum di populerkannya konsep financial inclusion itu sendiri, karena BPR adalah sebuah konsep perbankan yang memang sejak awal sudah mengusung fungsi sebagai “community bank” dan eksis di wilayah pedesaan Indonesia. Keberadaan BPR Islam atau yang lebih populer dengan BPRS, tentu juga memperlihatkan

				<p>kontribusi yang besar dalam merealisasi financial inclusion ini. Evaluasi empiris terhadap beberapa fakta seperti: Peningkatan kantor dan jaringan BPRS, Peningkatan Aksesibilitas ke sektor UMK, Sistem Layanan Perbankan yang beorientasi customer oriented dan social justiced, serta penganeekaragaman produk-produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memperlihatkan eksistensi BPRS dalam 5 tahun belakangan ini semakin meningkat. Namun sejalan dengan ekspansi sektor perbankan yang makin nyata, BPRS memerlukan upaya optimalisasi di berbagai hal yang meliputi penguatan strategi regulasi, penguatan strategi sosialisasi, penguatan daya saing dan penguatan aspek sumber daya insani. Penguatan aspek eksternal dan internal BPRS akan menjamin terselenggaranya community bank yang handal dan mampu mensupport community development di pedesaan.</p>
13.	Roa, Maria Jose. (2015). <i>Financial Inclusion in Latin America and the Caribbean: Access, Usage and Quality</i> .	Studi ini menyajikan gambaran umum tentang keuangan inklusi di Amerika Latin dan Karibia.	Metode kuantitatif	Tujuan makalah ini adalah untuk mendeskripsikan keseluruhan tren penyertaan keuangan di lac berdasarkan dimensi yang berbeda. Di kasus di wilayah tersebut, berbagai penelitian menunjukkan bahwa inklusi keuangan

				Dalam hal akses, pemakaian dan kualitasnya rendah dibandingkan dengan yang dikembangkan negara dan beberapa negara berkembang, khususnya tentang penggunaan dan kualitas.
14.	Efobi, Uchenna and Tanankem, Belmondo and Asongu, Simplicie and Beecroft, Ibukun. (2016). <i>Exploring Multidimensional Financial Inclusion and Manufacturing Firms Performance in a Developing Country: The Case of Nigeria.</i>	Untuk mengetahui dampak inklusi keuangan terhadap kinerja perusahaan manufaktur di Nigeria.	Penelitian ini menggunakan teknik pencocokan.	Kinerja perusahaan lebih baik dengan bantuan akses terhadap layanan bank, namun perbedaannya berbeda dengan jenis akses yang mereka miliki. Dapat diinterpretasikan hasil ini karena menunjukkan bahwa <i>financial deepening</i> meningkatkan kinerja perusahaan hanya bergantung pada jenis inklusi keuangan yang sedang diamati.
16.	Haldar, P.K. and Rahman, S.M. Mahbubur and Mia, Md. Shahin and Ahmed, Ferdousi and Bahsawir, Ahmad. (2016). <i>Assessing the Role of Corporate Social Responsibility Practices of Commercial Banks in Enhancing Financial Inclusion: A Study on Banking Sector in Bangladesh.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menilai peran inisiatif corporate social responsibility (CSR) bank umum dalam meningkatkan FI di Bangladesh.	Metode kuantitatif.	Analisis menunjukkan bahwa penetrasi geografis dan demografis layanan perbankan di negara ini telah meningkat secara signifikan selama 5 tahun terakhir. Akibatnya, FI dalam hal jumlah penduduk meningkat dari 48,86% di tahun 2008 menjadi 63,46% pada tahun 2012. Namun, keseluruhan FI melalui layanan perbankan telah mengikuti langkah sederhana. Studi ini juga menemukan bahwa Bank komersial swasta berkontribusi lebih dalam meningkatkan FI melalui praktik CSR daripada bank komersial milik negara dan bank komersial asing.

17.	Hidayah, Nur. (2016). <i>Implementasi Financial Inclusion (Keuangan Inklusif) bagi Masyarakat Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang 1) Bagaimana Upaya KJKS BMT Amanah Ummah dalam melaksanakan Financial Inclusion (Keuangan Inklusif) bagi Masyarakat Karah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya. 2) Bagaimana Implementasi Financial Inclusion (Keuangan Inklusif) bagi Masyarakat Karah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya.	Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.	KJKS BMT Amanah Ummah salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan <i>financial inclusion</i> (keuangan inklusif). Syarat dan ketentuan tabungan dirasa mudah oleh nasabah, tapi dalam hal pembiayaan syarat dan ketentuan masih dirasa rumit dan terlalu banyak persyaratan. Selain itu produk kurang berinovasi serta belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat kelas bawah dan kurangnya memberikan edukasi bagi masyarakat. Letak lokasi kantor mudah dijangkau oleh masyarakat. Sistem komunikasi pemasaran menggunakan sistem jemput bola. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka proses pelaksanaan <i>financial inclusion</i> (keuangan inklusif) masih belum maksimal sesuai dengan indikator keuangan inklusif.
19.	Mandala, Jessica Devi. (2016). <i>Pengaruh Jumlah Kantor Bank, Jumlah ATM, dan Besarnya Pendapatan Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan di Jawa Timur Tahun 2014.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh jumlah kantor, jumlah ATM, dan besarnya pendapatan terhadap dana pihak ketiga perbankan di Jawa Timur.	Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah kantor bank dan ATM tidak signifikan terhadap perkembangan dana pihak ketiga. Hal ini memaknai bahwa penambahan jumlah kantor bank dan ATM tidak memiliki hasil yang signifikan terhadap dana pihak ketiga. Hal ini memiliki makna bahwa jumlah

				<p>produk domestik bruto mempengaruhi dana pihak ketiga. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan bagi bank untuk lebih memperhatikan masyarakat kelas menengah kebawah agar ikut berpartisipasi sebagai pelaku ekonomi. Karena dengan begitu dapat membantu meningkatkan perekonomian nasional.</p>
20.	<p>Ong, Nancy and Kwie, A and Jurgens. (2016). <i>Identifying Constraints to Financial Inclusion and their impact on GDP and Inequality: A case of Suriname.</i></p>	<p>Untuk mengidentifikasi Hambatan terhadap Inklusi Keuangan Dan dampaknya terhadap PDB dan Ketidakseimbangan (Kasus Suriname)</p>	<p>Metode kuantitatif.</p>	<p>Dalam tulisan ini model mikro didirikan untuk menilai dampaknya penyertaan keuangan terhadap PDB dan ketidaksetaraan di Suriname. Penekanannya adalah pada tiga bentuk inklusi keuangan yaitu akses (yang diukur dengan ukuran dari biaya partisipasi), kedalaman (yang diukur dengan ukuran batasan agunan akibat komitmen terbatas), dan efisiensi intermediasi (diukur dengan ukuran suku bunga).</p>
21.	<p>Primadani, Renny Regina Setya. (2016). <i>Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan Pada Dimensi Akses Terhadap Perkembangan Dana Pihak Ketiga Masyarakat di Bank BRI Kota Batu Tahun 2011-2014.</i></p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk ini mengukur pengaruh dimensi akses terhadap perkembangan dana pihak ketiga. Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang diperoleh Bank dari masyarakat meliputi tabungan, deposito, dan giro.</p>	<p>Teknik dokumentasi</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa, jumlah kantor bank dan ATM per 1000 penduduk dewasa berpengaruh positif signifikan terhadap dana pihak ketiga. Tetapi, jumlah kantor bank dan ATM per 1000 km<sup>2</sup> berpengaruh negatif signifikan terhadap dana pihak ketiga. Jumlah kantor bank dan ATM per 1000 penduduk dewasa dan per 1000 km<sup>2</sup> terhadap dana pihak</p>

				ketiga secara simultan berpengaruh positif signifikan.
22.	Purba, Marlina Fransiska. (2016). <i>Analisis Keterkaitan Indeks Inklusi Keuangan terhadap Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Jawa Tengah 2010-2014.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi inklusi keuangan pada kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah serta untuk menguji dan menganalisis pengaruh indeks inklusi keuangan terhadap tingkat kemiskinan dan pemerataan pendapatan.	Metode yang digunakan adalah analisis indeks inklusi keuangan dan analisis uji hubungan kausalitas antara indeks inklusi keuangan terhadap tingkat kemiskinan dan pemerataan pendapatan	Secara keseluruhan indeks inklusi keuangan di kabupaten/kota Jawa Tengah termasuk dalam kategori indeks inklusi keuangan yang rendah, hanya dua wilayah yaitu Kabupaten/Kota Semarang dan Kota Surakarta yang memiliki indeks inklusi keuangan yang tinggi. Hasil uji kausalitas indeks inklusi keuangan terhadap indeks gini menunjukkan hubungan satu arah dimana indeks gini mempengaruhi indeks inklusi keuangan. Sedangkan hubungan kausalitas indeks inklusi keuangan dengan tingkat kemiskinan menunjukkan tidak adanya hubungan kausalitas.
23.	Rojas, Liliana and Suarez. 2016. <i>Financial Inclusion in Latin America: Facts, Obstacles and Central Banks' Policy Issues.</i>	Makalah ini membahas tiga isu utama terkait penyertaan keuangan di Amerika Latin: (a) Evolusi baru kesenjangan inklusi keuangan daerah relatif terhadap pengelompokan negara lain; (b) Kepentingan relatif dari hambatan alternatif dalam menjelaskan kesenjangan ini; (c) Tantangan bagi bank sentral daerah yang timbul dari masuknya penawaran pemain baru layanan	Metode kualitatif.	Analisis menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam penggunaan layanan keuangan alternatif oleh populasi orang dewasa di Amerika Latin, kesenjangan inklusi keuangan daerah relatif terhadap komparator (negara dengan tingkat perkembangan yang sama) belum berkurang secara umum dan, pada beberapa kasus bahkan meningkat selama periode 2011-2014.

		keuangan untuk orang miskin.		
24.	Sanjaya, I Made dan Nursechafia. (2016). <i>Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Inkusif: Analisis Antar Provinsi di Indonesia</i> .	Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis tingkat inklusi keuangan dan pertumbuhan inklusif di Indonesia.	Metode fungsi kesempatan sosial (social opportunity function) dengan meningkatkan tingkat kesempatan rata-rata dan indeks pemerataan kesempatan (equity index of opportunities).	Dengan menggunakan data provinsi, penelitian ini menghitung <i>Index of Financial Inclusion</i> (IFI) berdasarkan aksesibilitas, availibilitas, dan penggunaan jasa sektor keuangan. Hasilnya menunjukkan bahwa inklusi keuangan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dimensi aksesibilitas, sedangkan dimensi availibilitas dan penggunaan hanya memiliki proporsi yang kecil. Hal ini membawa kita pada kesimpulan bahwa kelompok masyarakat miskin cukup terbatas dalam memanfaatkan layanan jasa sektor keuangan. Lebih jauh lagi, penelitian ini menggunakan fungsi kesempatan sosial ( <i>social opportunity function</i> ) untuk mengukur pertumbuhan inklusif, dan menemukan korelasi positif dengan inklusi keuangan.
25.	Sarah, Hidayati. (2016). <i>Dampak Branchless Banking terhadap Kinerja Keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk</i> .	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Bank Muamalat Indonesia sebelum dan sesudah branchless Perbankan dan merumuskan strategi alternatif untuk Bank Muamalat Indonesia untuk meningkatkan	Metode sampel uji-t berpasangan untuk memperoleh tingkat makna	Studi ini menemukan bahwa rasio keuangan dalam bentuk CAR, ROA dan ROE sebelum dan sesudah Branchless Banking yang berbeda secara signifikan, sedangkan FDR tidak berbeda secara signifikan.

		kinerja keuangan mereka.		
26.	Husaeni, Uus Ahmad. (2017). <i>Determinan Pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga (DPK), rasio kecukupan modal (CAR), rasio FDR (Financing to Deposit Ratio) dan tingkat pembiayaan bermasalah (non performing financing) terhadap penyaluran pembiayaan BPRS.	Analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian, secara simultan menunjukkan bahwa DPK (Dana Pihak Ketiga), CAR (Capital Adequacy Ratio), FDR (Financing to Deposit Ratio) dan NPF (Non Performing Financing) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan BPRS, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.2.1 Keuangan Inklusif

Istilah *financial inclusion* atau keuangan inklusif menjadi tren paska krisis 2008 terutama didasari dampak krisis kepada kelompok *in the bottom of the pyramid* (pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya *unbanked* yang tercatat sangat tinggi di luar negara maju.

Pada G20 Pittsburgh Summit 2009, anggota G20 sepakat perlunya peningkatan akses keuangan bagi kelompok ini yang dipertegas pada Toronto Summit tahun 2010, dengan dikeluarkannya 9 *Principles for Innovative Financial Inclusion* sebagai pedoman pengembangan keuangan inklusif. Prinsip tersebut adalah *leadership, diversity, innovation, protection, empowerment, cooperation, knowledge, proportionality, dan framework*. Sejak saat itu banyak fora-fora

internasional yang memfokuskan kegiatannya pada keuangan inklusif seperti CGAP, World Bank, APEC, Asian Development Bank (ADB), Alliance for Financial Inclusion (AFI), termasuk BIS dan Financial Action Task Force (FATF), termasuk negara berkembang dan Indonesia.

Belum atau tidak terdapat definisi yang baku dari keuangan inklusif, berbagai institusi mencoba untuk mendefinisikannya, sebagai berikut:

*“State in which all working age adults have effective access to credit, savings, payments, and insurance from formal service providers. Effective access involves convenient and responsible service delivery, at a cost affordable to the customer and sustainable for the provider, with the result that financially excluded customers use formal financial services rather than existing informal options”* (CGAP-GPFI).

*“Financial inclusion involves providing access to an adequate range of safe, convenient and affordable financial services to disadvantaged and other vulnerable groups, including low income, rural and undocumented persons, who have been underserved or excluded from the formal financial sector”* (FATF).

*“Process of ensuring access to appropriate financial products and services needed by all sections of the society in general and vulnerable groups such as weaker sections and low income groups in particular, at an affordable cost in a fair and transparent manner by regulated, mainstream institutional players”* (RBI or Reserve Bank of India).

Keuangan inklusif (*financial inclusion*) adalah seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non

harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Keuangan inklusif ini merupakan strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan (Bank Indonesia, 2014).

Berbagai alasan menyebabkan masyarakat dimaksud menjadi *unbanked*, baik dari sisi *supply* (penyedia jasa) maupun *demand* (masyarakat), yaitu karena *price barrier* (mahal), *information barrier* (tidak mengetahui), *design product barrier* (produk yang cocok) dan *channel barrier* (sarana yang sesuai). Keuangan inklusif mampu menjawab alasan tersebut dengan memberikan banyak manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat, regulator, pemerintah dan pihak swasta, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi ekonomi
2. Mendukung stabilitas sistem keuangan
3. Mengurangi *shadow banking* atau *irresponsible finance*
4. Mendukung pendalaman pasar keuangan
5. Memberikan potensi pasar baru bagi perbankan
6. Mendukung peningkatan *Human Development Index* (HDI) Indonesia
7. Berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang sustain dan berkelanjutan
8. Mengurangi kesenjangan (*inequality*) dan rigiditas *low income trap*, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan

Dari berbagai belahan dunia, untuk menurunkan *financial exclusion* dilakukan dalam dua pendekatan, yaitu secara komprehensif dengan menyusun suatu strategi nasional seperti Indonesia, Nigeria, Tanzania atau melalui berbagai program terpisah, misalnya edukasi keuangan seperti dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat paska krisis 2008.

Secara umum, pendekatan melalui suatu strategi nasional mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu penyediaan sarana layanan yang sesuai, penyediaan produk yang cocok, *responsible finance* melalui edukasi keuangan dan perlindungan konsumen. Penerapan keuangan inklusif umumnya bertahap dimulai dengan target yang jelas seperti melalui penerima bantuan program sosial pemerintah atau pekerja migran (TKI) sebelum secara perlahan dapat digunakan oleh masyarakat umum.

Strategi keuangan inklusif bukanlah sebuah inisiatif yang terisolasi, sehingga keterlibatan dalam keuangan inklusif tidak hanya terkait dengan tugas Bank Indonesia, namun juga regulator, kementerian dan lembaga lainnya dalam upaya pelayanan keuangan kepada masyarakat luas. Melalui strategi nasional keuangan inklusif diharapkan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan tercipta secara baik dan terstruktur.

Gambar 2.1

## Pelaku Keuangan Inklusif



Sumber: Website Bank Indonesia

Keuangan inklusif sangat relevan untuk mendukung efektivitas fungsi dan tugas Bank Indonesia baik dari sisi moneter, sistem pembayaran dan terutama makroprudensial. Keuangan Inklusif membantu menurunkan tekanan dari sisi likuiditas (*liquidity risk*) dan risiko kredit (*credit risk*) di sektor perbankan. Dari sisi likuiditas, perbankan memperoleh sumber dana retail yang relatif lebih stabil meskipun dalam kondisi *shock*. Dari sisi kredit, terbukanya pasar retail baru, khususnya kredit mikro dan kecil sehingga membantu diversifikasi *portfolio* dan risiko kredit. Selanjutnya program-program keuangan inklusif juga membantu meningkatkan kapabilitas masyarakat dengan munculnya *responsible finance* karena adanya program edukasi keuangan dan perlindungan konsumen.

Dengan keuangan inklusif, *policy rate* dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat di manapun berada mengingat transmisi *policy rate* utamanya dilakukan melalui bank, sehingga membantu efektivitas kebijakan moneter dan tidak ada lagi masyarakat yang terkena *second round effect* dari kebijakan dimaksud. Semakin lancarnya sistem pembayaran ke seluruh pelosok daerah dan digunakan oleh seluruh penduduk di manapun berada. Di samping itu juga membantu pelaksanaan program *less cash society* yang mempunyai nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian.

Pada dasarnya, kebijakan keuangan inklusif adalah suatu bentuk pendalaman layanan keuangan (*financial service deepening*) yang ditujukan kepada masyarakat *in the bottom of the pyramid* untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman (*keeping*), transfer, menabung maupun pinjaman dan asuransi. Hal ini dilakukan tidak saja menyediakan produk dengan cara yang sesuai tapi dikombinasikan dengan berbagai aspek ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

#### 2.2.2 Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)

Indonesia termasuk negara dengan tingkat *financial exclusion* cukup tinggi. Hal ini terlihat dari beberapa hasil survei dan penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga nasional maupun internasional.

**Gambar 2.2**  
**Hasil Survei**



Sumber: Website Bank Indonesia

Untuk meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia, dipilih dengan cara komprehensif dengan menyusun suatu strategi nasional yang disusun bersama antara Bank Indonesia, kantor wakil presiden (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/TNP2K) dan Kementerian Keuangan yang disebut dengan Strategi Nasional keuangan Inklusif. Berikut ini adalah pilar-pilar yang menjadi pedoman untuk menjalankan Strategi Nasional keuangan Inklusif:

**Gambar 2.3**  
**Pilar SNKI**



Sumber: Website Bank Indonesia

#### Pilar 1: Edukasi Keuangan

Merupakan strategi kebijakan untuk meningkatkan kapabilitas dalam mengelola keuangan yang dimulai dengan peningkatan pemahaman (pengetahuan) dan kesadaran masyarakat mengenai produk dan jasa keuangan. Ruang lingkup edukasi keuangan ini meliputi:

- Pengetahuan dan kesadaran tentang ragam produk dan jasa keuangan
- Pengetahuan dan kesadaran tentang risiko terkait dengan produk keuangan
- Perlindungan nasabah
- Keterampilan mengelola keuangan

## Pilar 2: Fasilitas Keuangan Publik

Strategi pada pilar ini mengacu pada kemampuan dan peran pemerintah dalam penyediaan pembiayaan keuangan publik baik secara langsung maupun bersyarat guna mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa inisiatif dalam pilar ini meliputi:

- a. Subsidi dan bantuan sosial
- b. Pemberdayaan masyarakat
- c. Pemberdayaan UMKM

## Pilar 3: Pemetaan Informasi Keuangan

Pilar ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, terutama yang tadinya dikategorikan tidak layak untuk menjadi layak atau dari *unbankable* menjadi *bankable* dalam memperoleh layanan keuangan oleh institusi keuangan formal. Inisiatif yang dilakukan di pilar ini meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas (melalui penyediaan pelatihan dan bantuan teknis)
- b. Sistem jaminan alternatif (lebih sederhana namun tetap memperhatikan risiko terkait)
- c. Penyediaan layanan kredit yang lebih sederhana
- d. Identifikasi nasabah potensial

## Pilar 4: Kebijakan atau Peraturan yang Mendukung

Pelaksanaan program keuangan inklusif membutuhkan dukungan kebijakan baik oleh pemerintah maupun Bank Indonesia guna meningkatkan akses akan layanan jasa keuangan. Inisiatif untuk mendukung pilar ini antara lain meliputi:

- a. Kebijakan mendorong sosialisasi produk jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- b. Menyusun skema produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- c. Mendorong perubahan ketentuan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian secara proporsional
- d. Menyusun peraturan mekanisme penyaluran dana bantuan melalui perbankan
- e. Memperkuat landasan hukum untuk meningkatkan perlindungan konsumen jasa keuangan
- f. Menyusun kajian yang berkaitan dengan keuangan inklusif untuk menentukan arah kebijakan secara berkelanjutan

#### Pilar 5: Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi

Pilar ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran lembaga keuangan akan keberadaan segmen yang potensial di masyarakat sekaligus mencari beberapa metode alternatif untuk meningkatkan distribusi produk dan jasa keuangan. Beberapa aspek pada pilar ini meliputi:

- a. Fasilitasi forum intermediasi dengan mempertemukan lembaga keuangan dengan kelompok masyarakat produktif (layak dan *unbanked*) untuk mengatasi masalah informasi yang asimetris
- b. Peningkatan kerjasama antar lembaga keuangan untuk meningkatkan skala usaha

- c. Eksplorasi berbagai kemungkinan produk, layanan, jasa dan saluran distribusi inovatif dengan tetap memberikan perhatian pada prinsip kehati-hatian

#### Pilar 6: Perlindungan Konsumen

Pilar ini bertujuan agar masyarakat memiliki jaminan rasa aman dalam berinteraksi dengan institusi keuangan dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan. Komponen yang berada pada pilar ini meliputi:

- a. Transparansi produk
- b. Penanganan keluhan nasabah
- c. Mediasi
- d. Edukasi konsumen.

Implementasi dari SNKI di Bank Indonesia mengarah kepada fungsi-fungsi dimaksud dengan penekanan implementasi dilakukan melalui aspek sistem pembayaran, yaitu mendidik masyarakat *in the bottom of the pyramid* untuk belajar “*keeping*” uangnya dari *cash-based*, yaitu menyimpan uang di dalam rumah menjadi *account-based*, yaitu menyimpan uang dalam bentuk rekening uang elektronik. Hal ini dapat membantu mengurangi tendensi konsumtif sekaligus titik awal *financial diary*, mengelola keuangan sederhana yang diperkuat dengan program edukasi keuangan.

Dengan SNKI diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas dan kualitas hidup dari kelompok *the bottom of the pyramid*. Hal ini dapat membantu pengurangan kemiskinan sekaligus memperoleh *dividend demografi* karena tingginya usia produktif Indonesia saat ini dan ke depan ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

### 2.2.3 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016

Strategi Nasional Keuangan Inklusif telah dilaksanakan sejak tahun 2012 namun belum ada regulasi khusus dari pemerintah mengenai penerapan strategi tersebut. Pada tanggal 7 September 2016, Presiden Ir. H. Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif dengan isi sebagai berikut:

#### a. Pengertian

Keuangan inklusif didefinisikan sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Layanan keuangan yang disediakan harus dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan mudah untuk diakses dari sisi persyaratan serta layanan. Selain itu, layanan keuangan yang aman dimaksudkan agar masyarakat terlindungi hak dan kewajibannya dari risiko yang mungkin timbul.

#### b. Visi dan Misi

##### Visi

Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal melalui peningkatan pemahaman tentang sistem, produk, dan jasa keuangan, serta ketersediaan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Misi

- a) Meningkatkan kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan.
  - b) Menyediakan produk dan jasa keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
  - c) Meningkatkan pengetahuan dan rasa aman masyarakat dalam penggunaan layanan keuangan.
  - d) Memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.
  - e) Mendorong pengembangan keuangan inklusif untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia.
- c. Prinsip
- a) Kepemimpinan (*leadership*): menumbuhkan komitmen pemerintah dan otoritas keuangan terhadap peningkatan keuangan inklusif.
  - b) Keragaman (*diversity*): mendorong ketersediaan berbagai layanan keuangan oleh penyedia layanan keuangan yang beragam.
  - c) Inovasi (*innovation*): mendorong inovasi teknologi dan kelembagaan sebagai sarana untuk memperluas akses dan penggunaan sistem keuangan.
  - d) Perlindungan (*protection*): mendorong pendekatan yang komprehensif bagi perlindungan konsumen yang melibatkan peran seluruh pemangku kepentingan pada sektor publik, swasta, dan masyarakat.
  - e) Pemberdayaan (*empowerment*): mengembangkan literasi keuangan dan kemampuan keuangan masyarakat.

- f) Kerja sama (*cooperation*): memperkuat koordinasi dan mendorong kemitraan antara seluruh pemangku kepentingan pada sektor publik, swasta, dan masyarakat.
- g) Pengetahuan (*knowledge*): menggunakan data dan informasi dalam penyusunan dan pengembangan kebijakan, serta pengukuran keberhasilan yang dilaksanakan oleh regulator dan penyedia layanan keuangan.
- h) Proporsionalitas (*proportionality*): membentuk kerangka kebijakan dan peraturan yang secara proporsional mempertimbangkan aspek risiko dan manfaat dari inovasi produk dan jasa keuangan.
- i) Kerangka kerja (*framework*): mempertimbangkan kerangka kerja peraturan yang mencerminkan standar internasional, kondisi nasional, dan dukungan bagi sistem keuangan yang kompetitif.

d. Target

Keuangan inklusif menekankan penyediaan layanan keuangan berdasarkan kebutuhan yang berbeda dari tiap kelompok masyarakat. Meskipun mencakup semua segmen masyarakat, kegiatan keuangan inklusif difokuskan pada kelompok yang belum terpenuhi oleh layanan keuangan formal yaitu masyarakat berpendapatan rendah, pelaku usaha mikro dan kecil, serta masyarakat yang merupakan lintas kelompok.

Masyarakat berpendapatan rendah adalah kelompok masyarakat 40% (empat puluh persen) berpendapatan terendah berdasarkan Basis Data Terpadu yang bersumber dari hasil kegiatan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Kelompok ini memiliki

akses terbatas atau tanpa akses sama sekali ke semua jenis layanan keuangan yang mencakup masyarakat penerima bantuan sosial, program pemberdayaan masyarakat, dan wirausaha yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk memperluas usaha. Sementara itu, pelaku usaha mikro dan kecil merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Selain kedua kelompok masyarakat di atas, sasaran keuangan inklusif juga mencakup masyarakat lintas kelompok, yang terdiri dari:

1. Pekerja Migran

Kelompok ini memiliki akses yang terbatas ke layanan keuangan formal untuk mendukung selama proses tahapan migrasi (pra, selama, dan pasca migrasi).

2. Wanita

Berdasarkan data *Global Findex* 2014, hanya 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) wanita Indonesia yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal.

3. Kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Kelompok ini antara lain terdiri dari anak terlantar, penyandang disabilitas berat, lanjut usia, mantan narapidana, dan mantan tunasusila.

4. Masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau terluar

Masyarakat ini tinggal di wilayah yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional ditinjau dari kriteria

perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, prasarana infrastruktur, kemampuan keuangan lokal, aksesibilitas dan karakteristik daerah.

#### 5. Kelompok Pelajar, Mahasiswa, dan Pemuda

Jumlah kelompok pelajar, mahasiswa, dan pemuda diperkirakan mencapai 106,8 juta orang atau 41,87% (empat puluh satu koma delapan tujuh persen) dari jumlah penduduk Indonesia tahun 2015.

#### 2.2.4 Indikator Keuangan Inklusif

Dalam Peraturan Presiden RI No. 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif dipaparkan beberapa indikator untuk mengukur pencapaian target utama keuangan inklusif, perlu ditetapkan indikator keuangan inklusif sebagai pedoman untuk:

1. Menetapkan tolok ukur pengembangan program keuangan inklusif.
2. Mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan program keuangan inklusif.
3. Monitoring pencapaian program keuangan inklusif baik di tingkat nasional maupun daerah.

Indikator keuangan inklusif dibagi menjadi tiga jenis dimensi sebagai berikut:

#### 1. Dimensi akses

Yaitu kemampuan untuk menggunakan layanan keuangan formal dalam hal keterjangkauan secara fisik dan biaya, yang diukur dengan:

- a. Jumlah kantor layanan keuangan formal per 100.000 penduduk dewasa.

- b. Jumlah mesin ATM/EDC/*Mobile* POS lainnya per 100.000 penduduk dewasa.
- c. Jumlah agen layanan keuangan per 100.000 penduduk dewasa.

2. Dimensi penggunaan

Yaitu penggunaan aktual atas layanan dan produk keuangan, yang diukur dengan:

- a. Jumlah rekening tabungan di lembaga keuangan formal per 1.000 penduduk dewasa.
- b. Jumlah rekening kredit atau pembiayaan di lembaga keuangan formal per 1.000 penduduk dewasa.
- c. Jumlah rekening uang elektronik terdaftar (*registered*) pada agen Layanan Keuangan Digital (LKD).
- d. Persentase kredit atau pembiayaan terhadap total kredit atau pembiayaan di lembaga keuangan formal.
- e. Jumlah rekening kredit atau pembiayaan UMKM di lembaga keuangan formal per 1.000 penduduk dewasa.
- f. Jumlah penerima bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai.

3. Dimensi kualitas

Yaitu tingkat pemenuhan kebutuhan atas produk dan layanan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, yang diukur dengan:

- a. Indeks literasi keuangan.
- b. Jumlah pengaduan layanan keuangan.
- c. Persentase penyelesaian layanan pengaduan.

Dimensi kualitas adalah dimensi yang digunakan untuk mengetahui apakah ketersediaan atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan. Pengukuran terhadap dimensi ini masih sukar untuk dilakukan dan saat ini beberapa lembaga internasional yang *concern* dalam pengembangan keuangan inklusif sedang menyusun indikator dari dimensi kualitas beserta *tools* yang dipergunakan ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

#### 2.2.5 Perbankan Syariah

Dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respons dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia

jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah islam (Muhamad, 2014: 1).

Pendirian bank syariah di Indonesia berawal dari lokakarya “Bunga Bank dan Perbankan” pada 18-20 Agustus 1990, yang kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional (MUNAS) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid, Jakarta, pada 22-25 Agustus tahun yang sama. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, terbentuk bank syariah pertama dengan nama PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1 November 1991 di Jakarta dengan Akte Pendirian oleh Notaris Yudo Paripurno, SH. Dengan surat izin prinsip dari Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 5 November 1991, BMI resmi beroperasi (Ikatan Bankir Indonesia, 2014: 2).

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

#### 2.2.6 Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

- a. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia
- b. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan
- c. Pemerintah daerah

Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Bank Umum Syariah dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- c. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- d. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- e. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- f. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk

*ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah

- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah
- l. Melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah
- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah
- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah
- o. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*

- p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah
- q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, Bank Umum Syariah dapat pula:

- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya
- d. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah
- e. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal
- f. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik

- g. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang
- h. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal
- i. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah

Kegiatan yang dilarang untuk dilakukan oleh Bank Umum Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah
- b. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal
- c. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c
- d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah

#### 2.2.7 Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

UUS dapat menjadi Bank Umum Syariah tersendiri setelah mendapat izin dari Bank Indonesia. Izin perubahan UUS menjadi Bank Umum Syariah diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Kegiatan usaha Unit Usaha Syariah meliputi:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- c. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- d. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- e. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- f. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah

- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah
- i. Membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*
- j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah
- l. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah
- m. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah
- n. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah
- o. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, Unit Usaha Syariah dapat pula:

- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah
- b. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya
- d. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik
- e. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang
- f. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Kegiatan yang dilarang untuk dilakukan oleh Bank Umum Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah
- b. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal
- c. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c

- d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah

#### 2.2.8 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

- a. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikinya warga negara Indonesia
- b. Pemerintah daerah
- c. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
  1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
  2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah

b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:

1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musyarakah*
  2. Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*
  3. Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*
  4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
  5. Pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah*
- c. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS
- e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Kegiatan yang dilarang untuk dilakukan oleh Bank Umum Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah
- b. Menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran

- c. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia
- d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah
- e. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

### 2.2.9 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan ekspresi dari rangkaian angka yang populer sebagai salah satu ukuran kinerja sebuah entitas usaha. Setiap entitas sangat berkepentingan dengan profitabilitasnya. Salah satu alat analisis keuangan yang paling sering digunakan adalah rasio profitabilitas dimana rasio profitabilitas ini menjelaskan hal terpenting dalam entitas usaha dan tingkat pengembalian bagi investornya (Oktaviana dan Fitriyah, 2012: 144).

Menurut Aisyah (2015: 75) rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Secara umum rasio profitabilitas memiliki empat jenis rasio yaitu:

1. *Gross Profit Margin (GPM)*

Rasio *Gross Profit Margin* merupakan margin laba kotor. Margin laba kotor adalah memperlihatkan hubungan antara penjualan dan beban pokok penjualan, mengukur kemampuan sebuah perusahaan untuk mengendalikan biaya persediaan atau biaya operasi barang maupun untuk

meneruskan kenaikan harga melalui penjualan kepada pelanggan. Adapun rumus rasio *Gross Profit Margin* (GPM) adalah sebagai berikut:

$$\text{GPM} = \frac{\text{Sales} - \text{HPP}}{\text{Sales}} \times 100\%$$

Keterangan:

GPM : *Gross Profit Margin*

Sales : Penjualan

HPP : Harga Pokok Penjualan

## 2. *Net Profit Margin* (NPM)

Rasio *Net Profit Margin* atau Margin Laba Bersih merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Semakin tinggi NPM semakin baik operasi suatu perusahaan. Standar rata-rata industri untuk NPM yaitu 20%. □□□□

$$\text{NPM} = \frac{\text{EAIT}}{\text{PB}} \times 100\%$$

Keterangan:

NPM : *Net Profit Margin*

EAIT : *Earning After Interest and Tax*

PB : Penjualan Bersih

## 3. Hasil Pengembalian Equitas (*Return on Equity* / ROE)

*Return on Equity* merupakan rasio atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal

sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik keadaan perusahaan. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat. Standar rata-rata industri untuk ROE adalah 40%.

$$\text{ROE} = \frac{\text{EAIT}}{\text{Equity}} \times 100\%$$

Keterangan:

ROE : *Return On Equity*

EAIT : *Earning After Interest and Tax*

4. Hasil Pengembalian Investasi (*Return on Investment* atau *Return on Asset*)

Hasil pengembalian investasi atau *Return on Investment* atau *Return on Total Asset* (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Di samping itu, hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik keadaan perusahaan. Standar rata-rata industri adalah 30%.

$$\text{ROA} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Keterangan:

ROA : *Return On Asset*

EBIT : *Earning Before Interest and Tax*

### 2.3 Kajian Keislaman

Memberikan akses kepada masyarakat adalah kontribusi untuk mewujudkan *maqashid syariah* (Johnson, 2013). Harahap (2014) menjelaskan bahwa Izzuddin bin Abd al-Salam dalam bukunya *al-Qawa'id al-Shugra* menjelaskan bahwa *Maqasid al-Syariah* adalah المعانى والحكم yaitu makna-makna atau kebijaksanaan-kebijaksanaan. *Maqasid syariah* secara terminologi berarti tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam. Dalam istilah terminologi, *maqasid al-Syariah* dimaknai oleh Izzuddin bin Abd al-Salam yaitu:

“*Maqasid al-Syariah* adalah makna dan kebijaksanaan yang dipelihara oleh *syari'* pada semua penetapan hukum atau sebagian besarnya sekalipun tidak dikhususkan untuk memeliharanya pada setiap jenis hukum dari hukum-hukum syariah, maka termasuk didalamnya setiap hal yang diberi sifat hukum dan tujuannya yang tidak terlepas *syara'* dalam memeliharanya”. Lebih lanjut Izzuddin bin Abd salam menjelaskan bahwa semua *maqasid* bertujuan untuk memelihara aturan-aturan hukum yang ada dengan cara *Tahqiq al-Masalih* (mewujudkan kemaslahatan) dan *Dar'u al-mafasid* (menolak hal-hal yang merusak).

Izzuddin bin Abd al-salam menjelaskan bahwa syariat itu ditetapkan adalah untuk menghilangkan kesulitan dari manusia, menolak hal yang memudaratkan, mewujudkan maslahat bagi hamba, untuk membolehkan hal-hal yang baik, dan mengharamkan yang keji, sehingga membuat maslahat bagi manusia sampai kapan pun mulai dari awal sampai akhir hidupnya. Senada dengan pendapat tersebut Syathibi juga menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum

tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Sebagaimana dijelaskan Syatibi, doktrin *maqasid al-syariah* menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Demikian Juga Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa syariat itu dibuat dalam rangka mewujudkan maslahat manusia (*Masalih al-nas*) sampai kapan pun.

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya dalam menyediakan akses untuk masyarakat telah mewujudkan satu bentuk *maqashid syariah* dengan cara *Tahqiq al-Masalih* (mewujudkan kemaslahatan) untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kemaslahatan adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau faedah. Salah satu upaya untuk menyediakan akses itu adalah Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Untuk mewujudkan keuangan yang inklusif maka pemerintah Indonesia harus sangat memperhatikan dan menyentuh secara dekat masyarakat *in the bottom of line*.

Progam inklusi keuangan yang telah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia juga berdasar pada penggalan firman Allah SWT yakni Q.S. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

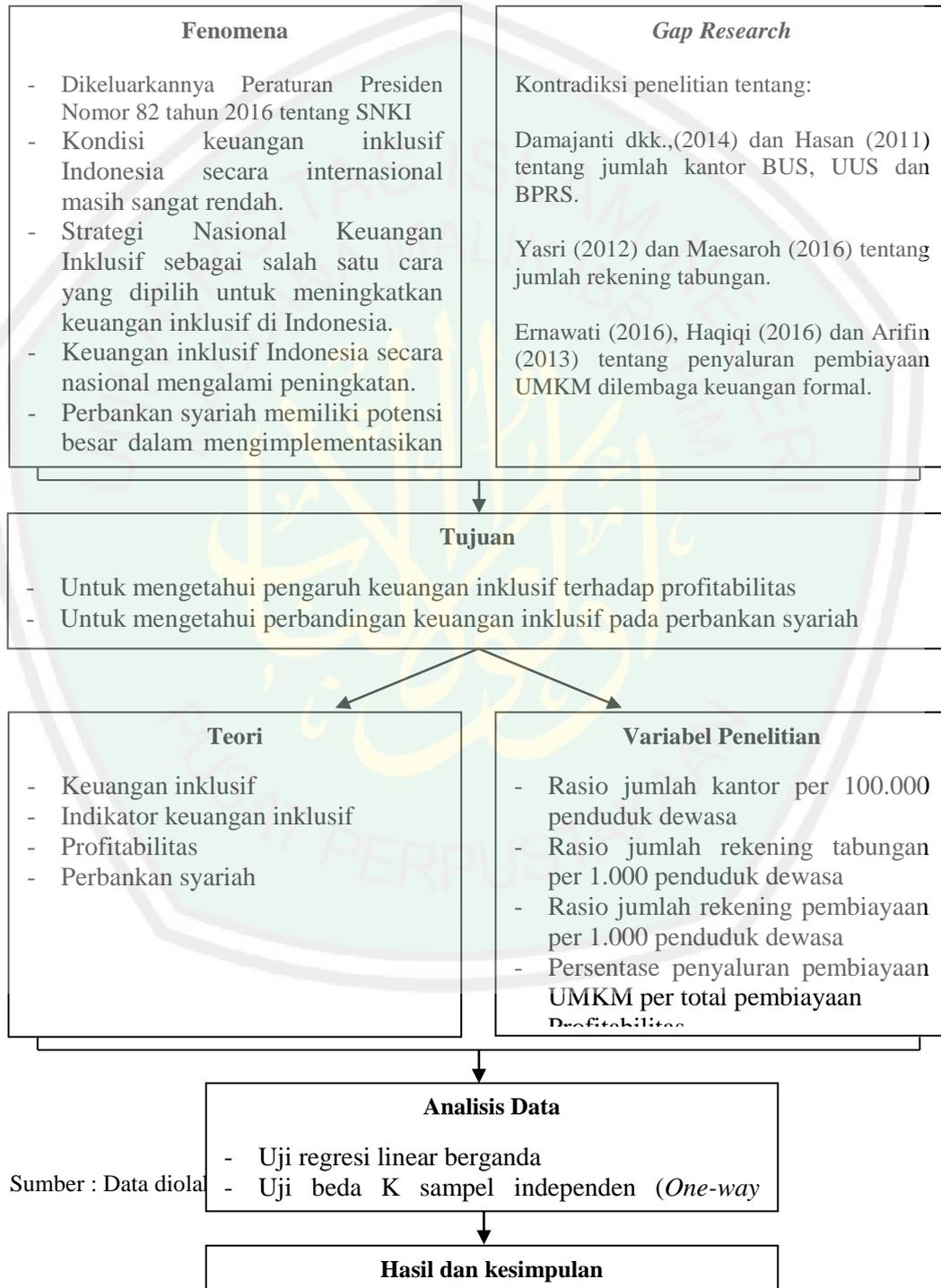
Artinya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT telah memerintahkan kita saling tolong menolong dalam hal kebaikan yang mendatangkan pahala bukan keburukan yang mendatangkan dosa. Maka, program inklusi keuangan yang di dalamnya terdapat penyediaan akses untuk masyarakat *in the bottom of line* adalah satu bentuk tolong-menolong sesama manusia. Pemerintah menolong masyarakat untuk mendapatkan akses layanan keuangan formal agar bisa meningkatkan taraf hidup mereka.

## 2.4 Kerangka Konseptual

**Gambar 2.4**  
**Kerangka Konseptual**



## 2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 2.5.1 Pengaruh keuangan inklusif (X) terhadap profitabilitas (Y)

Hipotesa pertama ( $H_1$ ) adalah keuangan inklusif memiliki pengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. Hal yang mendasari  $H_1$  yaitu hasil penelitian Nthambi (2015) bahwa keuangan inklusif berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (Y). Hipotesis pertama ( $H_1$ ) terbagi menjadi empat bagian antara lain:

$H_{1a}$  : Rasio jumlah kantor per 100.000 penduduk dewasa ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (Y)

$H_{1b}$  : Rasio jumlah rekening tabungan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (Y)

$H_{1c}$  : Rasio jumlah rekening pembiayaan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (Y)

$H_{1b}$  : Persentase penyaluran pembiayaan UMKM ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (Y)

### 2.5.2 Perbandingan keuangan inklusif pada perbankan syariah

Hipotesa kedua ( $H_2$ ) adalah perbandingan keuangan inklusif pada perbankan syariah di Indonesia. Hipotesa kedua ( $H_2$ ) terbagi menjadi beberapa bagian antara lain:

2.5.2.1 Perbandingan keuangan inklusif pada perbankan syariah berdasarkan rasio jumlah kantor per 100.000 penduduk dewasa ( $X_1$ )

Puteri (2015) mengemukakan pada tahun 2010-2013 pertumbuhan kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak secepat Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Hasil penelitian di atas menjadi landasan untuk menentukan hipotesis di bawah ini:

$H_{2a}$  : Bank Umum Syariah lebih inklusif dibandingkan dengan Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan rasio jumlah kantor per 100.000 penduduk dewasa ( $X_1$ )

2.5.2.2 Perbandingan keuangan inklusif pada perbankan syariah berdasarkan rasio jumlah rekening tabungan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_2$ ) dan rasio jumlah rekening pembiayaan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_3$ )

Yasri (2012) mengatakan besaran tabungan dan aksesibilitas mereka pada bank konvensional memperjelas keberadaan dan pentingnya bank syariah membina kedekatan dengan nasabah itu sendiri. Nasabah BUS/UUS sangat potensial karena pendapatannya mereka yang relatif besar dan kebutuhan dana mereka juga relatif besar. Sedangkan untuk BPRS akan mengalami kesulitan dalam membina kedekatan dengan nasabah itu sendiri karena nasabah sulit pindah dari konvensional kepada BPRS. Peneliti menentukan hipotesis yaitu:

$H_{2b}$  : Bank Umum Syariah lebih inklusif dibandingkan dengan Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan rasio jumlah rekening tabungan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_2$ )

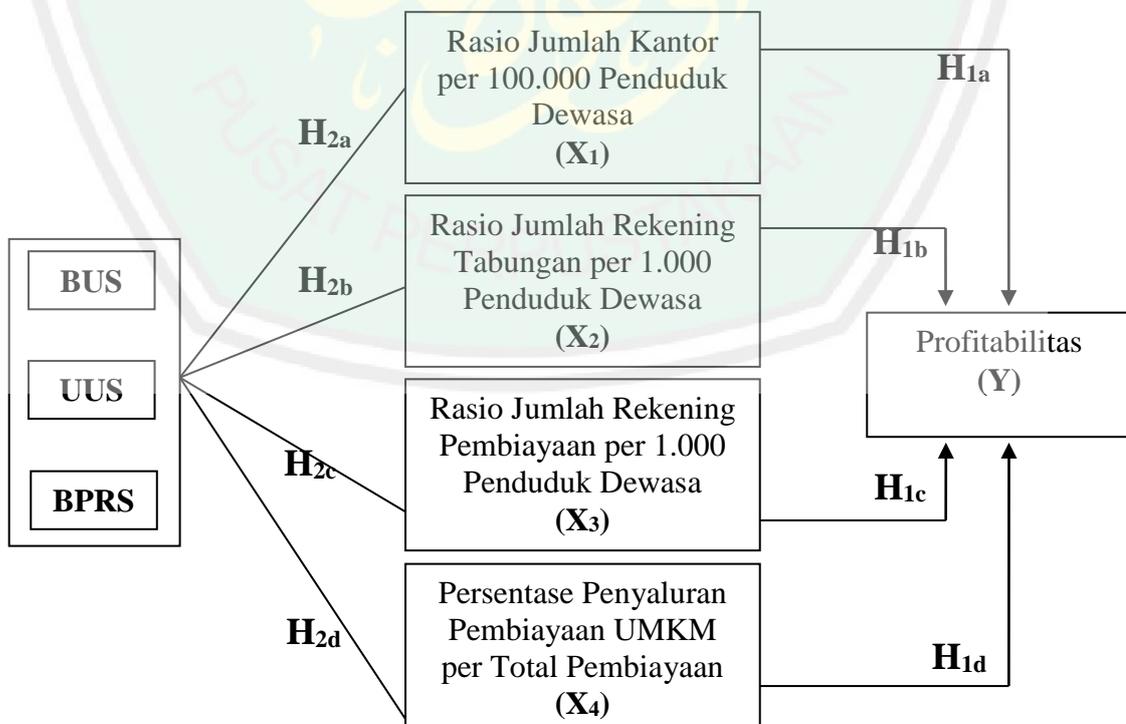
$H_{2c}$  : Bank Umum Syariah lebih inklusif dibandingkan dengan Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan rasio jumlah rekening pembiayaan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_3$ )

2.5.2.3 Perbandingan keuangan inklusif pada perbankan syariah berdasarkan persentase penyaluran pembiayaan UMKM per total pembiayaan ( $X_4$ )

Arifin (2013) membuktikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah lebih mampu menjangkau bisnis mikro dibandingkan bank komersil lainnya. Dari hasil penelitian tersebut maka peneliti membuat hipotesis di bawah ini:

$H_{1d}$ : Bank Pembiayaan Rakyat Syariah lebih inklusif dibandingkan dengan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berdasarkan persentase penyaluran pembiayaan UMKM per total pembiayaan ( $X_4$ )

**Gambar 2.5**  
**Hipotesis Penelitian**



Sumber: Data diolah peneliti, Maret 2017

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui (Kasiram, 2008a: 149).

Pendekatan penelitian pada penelitian ini lebih banyak menggunakan logika *hipotetiko verivicatif*, pendekatan tersebut dimulai dengan berpikir deduktif untuk menurunkan hipotesis kemudian melakukan pengujian di lapangan (Kasiram, 2008b: 156).

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

#### **3.3 Populasi dan Sampel**

Populasi yaitu keseluruhan sasaran yang seharusnya diteliti dan pada populasi itu hasil penelitian diberlakukan. Populasi adalah tempat terjadinya masalah yang kita selidiki. Populasi itu bisa manusia dan bukan manusia,

misalnya lembaga, badan sosial, wilayah, kelompok atau apa saja yang akan dijadikan sumber informasi (Kasiram, 2008c: 222). Populasi pada penelitian ini adalah perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti secara mendalam (Kasiram, 2008d: 223). Sampel dalam penelitian ini pada penelitian ini adalah perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

### **3.4 Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik *sampling* yaitu teknik yang digunakan untuk mengambil sampel agar terjamin representasinya terhadap populasi (Kasiram, 2008e: 223). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh karena semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

### **3.5 Data dan Sumber Data**

Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Irodah, 2017). Data sekunder yang dibutuhkan antara lain jumlah kantor, jumlah rekening tabungan, jumlah rekening pembiayaan, jumlah pembiayaan UMKM, total pembiayaan dan jumlah

penduduk dewasa Indonesia (usia 15 tahun ke atas) pada bulan Oktober 2014-Mei 2017.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik studi dokumentasi. Menurut Pratiwi dan Hindasah (2014: 196) dalam Irodah (2017), pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan kategori dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data tersebut diolah kembali sesuai dengan kebutuhan model yang digunakan.

Pada penelitian ini pengumpulan data diperoleh melalui:

1. Statistik Perbankan Syariah bulan Oktober 2014-Mei 2017 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Data yang dikumpulkan berjumlah 33 data untuk Bank Umum Syariah, 33 data untuk Unit Usaha Syariah dan 33 data untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Jumlah data keseluruhan adalah 99 data.
2. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2014-2017 yang di unduh melalui *website* Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

### 3.7 Variabel Penelitian

Menurut Kasiram (2008) variabel dapat dibedakan antara variabel dependen atau variabel terikat dan variabel independen atau variabel bebas. Selain variabel dependen atau variabel terikat dan variabel independen atau variabel bebas, terdapat variabel lain yaitu variabel moderator atau *moderate variable*, variabel kontrol atau *control variable* dan variabel antara atau *intervening variable*. Pada penelitian ini hanya menggunakan variabel dependen atau variabel terikat dan variabel independen atau variabel bebas.

#### 3.7.1 Variabel independen

Variabel independen atau variabel bebas yaitu variabel yang menjadi sebab atau yang mempengaruhi variabel terikat (Kasiram, 2008f: 2019). Variabel independen pada penelitian ini terdiri dari:

1. Rasio jumlah kantor per 100.000 penduduk dewasa ( $X_1$ )

Kantor adalah seluruh jaringan atau unit kantor bank yang tercatat dapat memberikan layanan keuangan kepada nasabah (melakukan kegiatan operasional) dan terpisah secara fisik dengan kantor utamanya. Jenis kantor bank yang tidak termasuk dalam kategori kantor layanan bank antara lain meliputi kantor pusat non operasional, kantor wilayah, kantor cabang di luar negeri, kantor cabang pembantu diluar negeri, kantor perwakilan bank umum diluar negeri, dan kas keliling atau kas mobil atau kas terapung baik untuk bank yang beroperasi secara konvensional dan syariah (MKI, BI).

Rasio ini menghitung jumlah kantor (bulan t) dibagi jumlah penduduk dewasa (tahun t) dan dikali 100.000. Perhitungan rasio bertujuan untuk

mengetahui jumlah kantor yang tersedia per 100.000 penduduk dewasa. Jika nilai rasio semakin tinggi maka tingkat keberhasilan penyediaan jasa atau layanan keuangan formal berupa kantor akan semakin baik.

2. Rasio jumlah rekening tabungan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_2$ ) dan rasio jumlah rekening pembiayaan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_3$ )

Rekening adalah /re·ke·ning//rékening/ *n* hitungan pembayaran (uang berlangganan, uang sewa, dan sebagainya) (KBBI).

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Akad yang dapat diterapkan pada produk giro adalah akad *wadiah* dan *mudharabah* (Muhamad, 2014: 35).

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk *piutang murabahah*, *salam*, dan *istishna'*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *piutang qardh* dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil (UU RI No. 21 Tahun 2008).

Rasio ini menghitung rekening tabungan dan pembiayaan (bulan  $t$ ) dibagi jumlah penduduk dewasa (tahun  $t$ ) dan dikali 1.000. Perhitungan rasio bertujuan untuk mengetahui besarnya rekening tabungan dan pembiayaan yang telah digunakan. Jika nilai rasio semakin tinggi maka tingkat keberhasilan penyediaan jasa atau layanan keuangan formal berupa tabungan dan pembiayaan akan semakin baik.

### 3. Persentase penyaluran pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan ( $X_4$ )

Persentase ini menghitung jumlah penyaluran pembiayaan (bulan  $t$ ) dibagi total pembiayaan (bulan  $t$ ) dan dikali 100. Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui besarnya penyaluran pembiayaan UMKM kepada masyarakat. Jika nilai semakin tinggi maka tingkat keberhasilan penyediaan jasa atau layanan keuangan formal berupa penyaluran pembiayaan UMKM akan semakin baik.

#### 3.7.2 Variabel dependen (Profitabilitas ( $Y$ ))

Variabel dependen atau variabel terikat yaitu variabel yang menjadi akibat atau yang dipengaruhi (Kasiram, 2008g: 219). Variabel dependen pada penelitian ini adalah profitabilitas yang diukur dengan *Return on Asset* (ROA).

*Return on Asset* (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan (Aisyah, 2015: 76). Berikut ini adalah rumus untuk menghitung *Return on Asset* (ROA):

$$\text{ROA} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Keterangan:

ROA : *Return On Asset*, EBIT : *Earning Before Interest and Tax*

**Tabel 3.1**  
**Definisi Operasional Variabel**

Konsep	Dimensi	Variabel	Pengukuran
Keuangan Inklusif	Dimensi akses	Rasio jumlah kantor per 100.000 penduduk dewasa	$\frac{\text{Jumlah kantor layanan (bulan t)}}{\text{Jumlah penduduk dewasa (tahun t)}} \times 100.000$
		Rasio jumlah rekening tabungan per 1.000 penduduk dewasa	$\frac{\text{Jumlah rekening tabungan (bulan t)}}{\text{Jumlah penduduk dewasa (tahun t)}} \times 1.000$
	Dimensi penggunaan	Rasio jumlah rekening pembiayaan per 1.000 penduduk dewasa	$\frac{\text{Jumlah rekening pembiayaan (bulan t)}}{\text{Jumlah penduduk dewasa (tahun t)}} \times 1.000$
		Persentase penyaluran pembiayaan UMKM per total pembiayaan	$\frac{\text{Jumlah penyaluran pembiayaan UMKM}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100$
Profitabilitas		<i>Return On Asset</i> (ROA)	$\frac{\text{EBIT}}{\text{Total aktiva}} \times 100$

Sumber: Metadata keuangan inklusif, Bank Indonesia.

Keterangan:

Penduduk dewasa adalah semua penduduk di suatu negara atau provinsi atau kabupaten/kota yang berusia di atas 15 tahun.

### 3.8 Analisis Data

Analisis data dari hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang paling penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Sebab data yang telah terkumpul, bila tidak di analisis hanya menjadi barang yang tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati, data yang tidak berbunyi. Oleh karena itu, analisis data berfungsi untuk memberi arti, makna dan nilai yang terkandung dalam data itu (Kasiram, 2008h: 321).

Menurut Kerlinger (1973: 134) dalam Kasiram (2008) tujuan utama dari analisis data ialah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan di test. Untuk itu, peneliti harus dapat mengolah dan menyajikan data dalam bentuk tabel-tabel atau grafik yang mudah dibaca, dipahami dan dapat dianalisis dengan teknik yang tersedia.

#### 3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif

Pengujian statistik dilakukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi variabel dalam penelitian (Irodah, 2017). Analisis statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari penentuan nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi masing-masing variabel dependen dan variabel independen.

#### 3.8.2 Analisis Uji Asumsi Dasar

Analisis uji asumsi dasar terdiri dari tiga jenis uji yaitu uji normalitas, uji homogenitas dan uji linieritas (Aisyah, 2015a: 14). Analisis uji asumsi dasar

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas, pengujian tersebut dilakukan untuk memenuhi persyaratan uji beda K sampel independen (*One-way ANOVA*).

#### 3.8.2.1 Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui, uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Uji normalitas dilakukan dengan uji statistik menggunakan uji non parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Jika nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov*  $> 0,05$  maka dinyatakan data terdistribusi normal atau asumsi normalitas terpenuhi (Aisyah, 2015b: 14).

#### 3.8.2.2 Uji homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah varian populasi sama atau tidak. Ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independen sampel T test dan ANOVA. Asumsi yang mendasari bahwa varian dari populasi adalah sama. Sebagai kriteria pengujian, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok data adalah sama (Aisyah, 2015c: 18).

#### 3.8.3 Analisis Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik merupakan pengujian terhadap model untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Dalam kenyataan

penelitian sering ditemukan adanya penyimpangan asumsi klasik, sehingga perlu pengujian untuk mengetahui sejauh mana asumsi klasik terpenuhi (Aisyah, 2015d: 14). Analisis uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi, pengujian tersebut dilakukan untuk memenuhi persyaratan uji regresi linear berganda.

#### 3.8.3.1 Uji multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dari hasil analisis. Apabila nilai *tolerance* lebih tinggi daripada 0,10 atau VIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas (Aisyah, 2015e: 22).

#### 3.8.3.2 Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah regresi terjadi kesamaan varian dari residual pengamatan satu ke pengamatan lainnya. Bila nilai signifikansi hasil korelasi  $< 0,05$  maka persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas (Aisyah, 2015f: 25).

#### 3.8.3.3 Uji Autokorelasi

Menurut Wikaya (2009) dalam Aisyah (2015) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya

### 3.8.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi merupakan salah satu teknik analisis data dalam statistika yang seringkali digunakan untuk mengkaji hubungan antar beberapa variabel dan meramal suatu variabel. Jika parameter dari suatu hubungan fungsional antara satu variabel dependen dengan lebih dari satu variabel ingin diestimasi, maka analisis regresi yang dikerjakan berkenaan dengan regresi berganda (*multiple regression*). Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) dengan variabel dependen ( $Y$ ). Analisis ini ditujukan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio (Aisyah, 2015g: 93).

Adapun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

Keterangan:

$Y'$  = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)

$X_1$  dan  $X_2$  = Variabel independen

$a$  = Konstanta (nilai  $Y'$  apabila  $X_1, X_2, \dots, X_n = 0$ )

$b$  = Koefisien regresi (nilai peningkatan atau penurunan)

Aisyah (2015) menjelaskan bahwa dalam analisis regresi linear berganda terdapat dua uji koefisien regresi yang dilakukan yaitu uji koefisien regresi secara

bersama-sama dan uji koefisien regresi secara parsial. Penjelasan masing-masing uji dapat dilihat di bawah ini:

a. Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y) atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak.

b. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji T)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

### 3.8.5 Analisis Uji Beda K Sampel Independen

Analisis varian satu variabel independen digunakan untuk menentukan rata-rata dua atau lebih kelompok data berbeda. Pada model ini, diperbolehkan ada beberapa variabel tetapi hanya untuk satu faktor (Aisyah, 2015h: 43).

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perbankan syariah. Perbankan syariah dikategorikan menjadi tiga yaitu Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Data penelitian berasal dari Statistik Perbankan Syariah bulan Oktober 2014-Mei 2017 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berjumlah 99 data.

Menurut data atau informasi yang telah terkumpul, jumlah Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Statistik Perbankan Syariah selama periode penelitian adalah 13 bank, Unit Usaha Syariah berjumlah 21 bank dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berjumlah 167 bank. Data atau informasi yang sudah terkumpul akan diolah dengan menggunakan program atau *software* SPSS versi 16.0. Berikut ini adalah perusahaan yang sesuai dengan jenisnya:

**Tabel 4.1**  
**Daftar Nama Perusahaan**  
**Bank Umum Syariah**

No.	Nama Perusahaan (Bank Umum Syariah)
1.	PT. Bank Aceh Syariah
2.	PT. Bank Muamalat Syariah
3.	PT. Bank Victoria Syariah
4.	PT. Bank BRISyariah
5.	PT. Bank Jabar Banten Syariah
6.	PT. Bank BNI Syariah

No.	Nama Perusahaan (Bank Umum Syariah)
7.	PT. Bank Syariah Mandiri
8.	PT. Bank Mega Syariah
9.	PT. Bank Panin Syariah
10.	PT. Bank Syariah Bukopin
11.	PT. BCA Syariah
12.	PT. Maybank Syariah Indonesia
13.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
<b>Jumlah</b>	<b>13 Bank</b>

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2017.

**Tabel 4.2**  
**Daftar Nama Perusahaan**  
**Unit Umum Syariah**

No.	Nama Perusahaan (Unit Usaha Syariah)
1.	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.
2.	PT. Bank Permata, Tbk.
3.	PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk.
4.	PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.
5.	PT. Bank OCBC NISP, Tbk.
6.	PT. Bank Sinarmas
7.	PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.
8.	PT. BPD DKI
9.	PT. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
10.	PT. BPD Jawa Tengah
11.	PT. BPD Jawa Timur, Tbk.
12.	PT. BPD Sumatera Utara
13.	PT. BPD Jambi
14.	PT. BPD Sumatera Barat
15.	PT. BPD Riau dan Kepulauan Riau
16.	PT. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
17.	PT. BPD Kalimantan Selatan
18.	PT. BPD Kalimantan Barat
19.	PT. BPD Kalimantan Timur
20.	PT. BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
21.	PT. BPD Nusa Tenggara Barat
<b>Jumlah</b>	<b>21 Bank</b>

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2017.

**Tabel 4.3**  
**Daftar Nama Perusahaan**  
**Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

No.	Nama Perusahaan (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)
1.	PT BPRS Amanah Rabbaniah
2.	PT BPRS Hareukat
3.	PT BPRS Amanah Ummah
4.	PT BPRS Artha Karimah Irsyadi
5.	PT BPRS Bina Amwalul Hasanah
6.	PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia
7.	PT BPRS Mentari
8.	PT BPRS Tulen Amanah
9.	PT BPRS Indo Timur
10.	PT BPRS Baiturridha Pusaka
11.	PT BPRS Harta Insan Karimah
12.	PT BPRS Barkah Gemadana
13.	PT BPRS Ibadurrahman
14.	PT BPRS Harta Insan Karimah Bekasi
15.	PT BPRS Margirizki Bahagia
16.	PT BPRS Bangun Drajat Warga
17.	PT BPRS SHADIQ AMANAH
18.	PT BPRS Harta Insan Karimah Cibitung
19.	PT BPRS Patuh Beramal
20.	PT BPRS Baktimakmur Indah
21.	PT BPRS Baiturrahman
22.	PT BPRS Tengku Chiek Dipante
23.	PT BPRS Syariat Fajar Sejahtera Bali
24.	PT BPRS Al Ma'soem Syari'ah
25.	PT BPRS Harum Hikmahnugraha
26.	PT BPRS Dana Moneter
27.	PT BPRS Surya Sejati

28.	PT BPRS Amanah Bangsa
29.	PT BPRS Asri Madani Nusantara
30.	PT BPRS Muamalah Cilegon
31.	PT BPRS Ishlalul Ummah
32.	PT BPRS Al Washliyah
33.	PT BPRS Al Wadi'ah
34.	PT BPRS Attaqwa
35.	PT BPRS Niaga Madani
36.	PT BPRS Al Falah
37.	PT BPRS Hasanah
38.	PT BPRS Wakalumi
39.	PT BPRS Artha Fisabilillah
40.	PT BPRS Al Ihsan
41.	PT BPRS Nurul Ikhwan
42.	PT BPRS Hikmah Wakilah
43.	PT BPRS Ikhsanul Amal
44.	PT BPRS Bhakti Haji
45.	PT BPRS Rahman Hijrah Agung
46.	PT BPRS Amanah Sejahtera
47.	PT BPRS Bandar Lampung
48.	PT BPRS Muamalat Harkat
49.	PT BPRS Al Barokah
50.	PT BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan
51.	PT BPRS Gebu Prima
52.	PT BPRS Daya Artha Mentari
53.	PT BPRS Mulia Berkah Abadi
54.	PT BPRS Puduarta Insani
55.	PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo
56.	PT BPRS Berkah Dana Fadhilah
57.	PT BPRS Bina Rahmah
58.	PT BPRS Al Hijrah Amanah

59.	PT BPRS Gala Mitra Abadi
60.	PT BPRS Carana Kiat Andalas
61.	PT BPRS Gowata
62.	PT BPRS Amanah Insani
63.	PT BPRS Muamalat Yotefa
64.	PT BPRS Rif'atul Ummah
65.	PT BPRS Insan Cita Artha Jaya
66.	PT BPRS Asad Alif
67.	PT BPRS Ampek Angkek Candung
68.	PT BPRS Al Mabror Babadan
69.	PT BPRS Ummu
70.	PT BPRS Berkah Ramadhan
71.	PT BPRS Bangka
72.	PT BPRS Investama Mega Bakti
73.	PT BPRS Bumi Rinjani Batu
74.	PT BPRS Cilegon Mandiri
75.	PT BPRS Situbondo
76.	PT BPRS Tanggamus
77.	PT BPRS Buana Mitra Perwira
78.	PT BPRS Artha Surya Barokah
79.	PT BPRS Bhakti Sumekar
80.	PT BPRS Suriyah
81.	PT BPRS Bina Amanah Satria
82.	PT BPRS Artha Madani
83.	PT BPRS Khasanah Ummat
84.	PT BPRS Safir
85.	PT BPRS Metro Madani
86.	PT BPRS Al-Yaqin
87.	PT BPRS Lantabur Tebuireng
88.	PT BPRS Haji Miskin
89.	PT BPRS Artha Mas Abadi

90.	PT BPRS Al Salaam Amal Salman
91.	PT BPRS PNM Binama
92.	PT BPRS Jabal Tsur
93.	PT BPRS Dinar Ashri
94.	PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo
95.	PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen
96.	PT BPRS Dana Hidayatullah
97.	PT BPRS Kota Bekasi
98.	PT BPRS Arta Leksana
99.	PT BPRS Sindanglaya Katonapan
100.	PT BPRS Bumi Artha Sampang
101.	PT BPRS Karya Mugi Sentosa
102.	PT BPRS Jabal Nur
103.	PT BPRS Barokah Dana Sejahtera
104.	PT BPRS Artha Amanah Ummat
105.	PT BPRS Mitra Amal Mulia
106.	PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera
107.	PT BPRS Renggali
108.	PT BPRS Syarikat Madani
109.	PT BPRS Dana Mulia
110.	PT BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas
111.	PT BPRS Sukowati Sragen
112.	PT BPRS Dana Amanah
113.	PT BPRS Mandiri Mitra Sukses
114.	PT BPRS Sarana Prima Mandiri
115.	PT BPRS Danagung Syariah
116.	PT BPRS Rajasa
117.	PT BPRS Tanmiya Artha
118.	PT BPRS Kotabumi
119.	PT BPRS Al Makmur
120.	PT BPRS Mitra Cahaya Indonesia

121.	PT BPRS Vitka Central
122.	PT BPRS Annisa Mukti
123.	PT BPRS FORMES
124.	PT BPRS Central Syariah Utama
125.	PT BPRS Cempaka Al Amin
126.	PT BPRS Madinah
127.	PT BPRS Lampung Timur
128.	PT BPRS Adeco
129.	PT BPRS Al Mabror
130.	PT BPRS MERU SANKARA
131.	PT BPRS Kota Juang
132.	PT BPRS Amanah Insan Cita
133.	PT BPRS Gunung Slamet
134.	PT BPRS Artha Pamenang
135.	PT BPRS Rahmania Dana Sejahtera
136.	PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta
137.	PT BPRS Rahma Syariah
138.	PT BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang
139.	PT BPRS SERAMBI MEKAH
140.	PT BPRS Mitra Harmoni Kota Malang
141.	PT BPRS Insan Madani
142.	PT BPRS Unawi Barokah
143.	PT BPRS Al-Madinah Tasikmalaya
144.	PT BPRS Way Kanan
145.	PT BPRS Oloan Ummah Sidempuan
146.	PT BPRS Dharma Kuwera
147.	PT BPRS Kota Mojokerto
148.	PT BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung
149.	PT BPRS Gajah Tongga Kota Piliang
150.	PT BPRS Cahaya Hidup
151.	PT BPRS Bahari Berkesan

152.	PT BPRS Syariah Magetan
153.	PT BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang
154.	PT BPRS Saka Dana Mulia
155.	PT BPRS Harta Insan Karimah Makassar
156.	PT BPRS Mitra Agro Usaha
157.	PT BPRS Mitra Amanah
158.	PT BPRS Harta Insan Karimah Surakarta
159.	PT BPRS Gotong Royong
160.	PT BPRS Aman Syariah
161.	PT BPRS Harta Insan Karimah Kota Tegal
162.	PT BPRS Lampung Barat
163.	PT BPRS Tani Tulang Bawang Barat
164.	PT BPRS Bogor Tegar Beriman
165.	PT BPRS Unisa Insan Indonesia
166.	PT BPRS Bhakti Sumekar
167.	PT BPRS Almasoem
<b>Jumlah</b>	<b>167 Bank</b>

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2017.

#### 4.1.2 Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range* dan *skewness* (kemencengan distribusi).

Penelitian ini menggunakan empat variabel independen yaitu rasio jumlah kantor per 100.000 penduduk dewasa ( $X_1$ ), rasio rekening tabungan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_2$ ), rasio rekening pembiayaan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_3$ ) dan persentase penyaluran pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan ( $X_4$ ) sedangkan variabel dependen adalah profitabilitas ( $Y$ ).

**Tabel 4.4**  
**Uji Statistik Deskriptif**

<b>Variabel</b>	<b>N</b>	<b>Nilai Minimum</b>	<b>Nilai Maksimum</b>	<b>Mean (Rata-rata)</b>	<b>Standar Deviasi</b>
X <sub>1</sub>	99	-1,90	0,17	-1,0425	0,78894
X <sub>2</sub>	99	1,67	4,09	2,5242	0,90101
X <sub>3</sub>	99	-1,08	0,82	-0,1417	0,65834
X <sub>4</sub>	99	-4,79	-3,04	-4,0354	0,57458
Valid N (listwise)	99				

Sumber: Data diolah peneliti, 2017.

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, variabel X<sub>1</sub> memiliki nilai maksimum sebesar 0,17 terdapat pada Bank Umum Syariah dan nilai minimum sebesar -1,90 terdapat pada Unit Usaha Syariah, *mean* (rata-rata) variabel ini adalah -1,0425 dengan standar deviasi sebesar 0,78894. Bank Umum Syariah unggul berdasarkan rasio jumlah kantor per 100.000 penduduk dewasa karena jumlah kantor yang ada memiliki jumlah besar jika dibandingkan Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan Unit Usaha Syariah memiliki jumlah kantor yang lebih rendah jika dibandingkan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Variabel X<sub>2</sub> memiliki nilai maksimum sebesar 4,09 terdapat pada Bank Umum Syariah dan nilai minimum sebesar 1,67 terdapat pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, *mean* (rata-rata) variabel ini adalah 2,5242 dengan standar deviasi sebesar 0,90101. Bank Umum Syariah memiliki jumlah rekening tabungan jika dibandingkan Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki jumlah rekening tabungan

yang paling sedikit jika dibandingkan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Variabel  $X_3$  memiliki nilai maksimum sebesar 0,82 terdapat pada Unit Usaha Syariah dan nilai minimum sebesar -1,08 terdapat pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, *mean* (rata-rata) variabel ini adalah -0,1417 dengan standar deviasi sebesar 0,65834. Unit Usaha Syariah memiliki jumlah rekening pembiayaan paling banyak jika dibandingkan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki jumlah rekening tabungan yang paling sedikit jika dibandingkan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Variabel  $X_4$  memiliki nilai maksimum sebesar -3,04 terdapat pada Unit Usaha Syariah dan nilai minimum sebesar -4,79 terdapat pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, *mean* (rata-rata) variabel ini adalah -4,0352 dengan standar deviasi sebesar 0,57458. Unit Usaha Syariah memiliki jumlah penyaluran pembiayaan kepada UMKM paling banyak jika dibandingkan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki jumlah rekening tabungan yang paling sedikit jika dibandingkan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

#### 4.1.5 Uji Asusmi Dasar

##### 4.1.5.1 Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui,

uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Uji normalitas dilakukan dengan uji statistik menggunakan uji non parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Jika nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov*  $> 0,05$  maka dinyatakan data terdistribusi normal atau asumsi normalitas terpenuhi (Aisyah, 2015: 14).

**Tabel 4.5**  
**Uji Normalitas**

<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>	Sig.	Keterangan
0,803	0,539	Asumsi normalitas terpenuhi

Sumber: Data diolah peneliti, 2017

Berdasarkan tabel 4.5 pada uji normalitas di atas diketahui nilai *Kolmogorov-Sminov Z* sebesar 0,803 dengan nilai signifikasi sebesar 0,534 maka dinyatakan data terdistribusi normal atau asumsi normalitas terpenuhi sehingga uji statistik menjadi valid untuk jumlah sampel yang tersedia. Data yang diuji normalitasnya telah mengalami transformasi dikarenakan adanya kebutuhan untuk memenuhi uji asumsi klasik yang akan dibahas pada sub bab berikutnya.

#### 4.1.5.2 Uji homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah varian populasi sama atau tidak. Ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independen sampel T test dan ANOVA. Asumsi yang mendasari bahwa varian dari populasi adalah sama. Sebagai kriteria pengujian, jika nilai signifikasi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok data adalah sama (Aisyah, 2015: 18).

**Tabel 4.6**  
**Uji Homogenitas**

Variabel	Sig.	Keterangan
X <sub>1</sub>	0,000	Asumsi non homogenitas terpenuhi
X <sub>2</sub>	0,000	Asumsi non homogenitas terpenuhi
X <sub>3</sub>	0,000	Asumsi non homogenitas terpenuhi
X <sub>4</sub>	0,000	Asumsi non homogenitas terpenuhi

Sumber: Data diolah peneliti, 2017

Berdasarkan tabel 4.6 pada uji homogenitas di atas diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000 pada seluruh variabel independen (X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub> dan X<sub>4</sub>). Nilai tersebut telah memenuhi kriteria uji homogenitas yang telah ditentukan. Data pada variabel independen (X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub> dan X<sub>4</sub>) merupakan data tidak homogen yang dapat diuji statistik dengan statistik non parametrik.

#### 4.1.6 Uji Asumsi Klasik

##### 4.1.6.1 Uji multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dari hasil analisis. Apabila nilai *tolerance* lebih tinggi daripada 0,10 atau VIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas (Aisyah, 2015: 22).

**Tabel 4.7**  
**Uji Multikolinearitas**

Variabel	Sig.	Tolerance	VIF	Keterangan
X <sub>1</sub>	0,000	0,122	8,209	Asumsi non multikolinearitas terpenuhi
X <sub>2</sub>	0,991	0,127	7,880	Asumsi non multikolinearitas terpenuhi
X <sub>3</sub>	0,578	0,167	6,004	Asumsi non multikolinearitas terpenuhi
X <sub>4</sub>	0,090	0,172	5,809	Asumsi non multikolinearitas terpenuhi

Sumber: Data diolah peneliti, 2017

Berdasarkan tabel 4.7 pada uji multikolinearitas diketahui nilai *tolerance* variabel X<sub>1</sub> sebesar 0,122, variabel X<sub>2</sub> sebesar 0,127, variabel X<sub>3</sub> sebesar 0,167 dan variabel X<sub>4</sub> sebesar 0.172. Nilai signifikasi seluruh variabel independen dinyatakan memenuhi asumsi non multikolinearitas karena memiliki nilai P<sub>value</sub> (Sig) > 0,10. Begitu juga dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) variabel X<sub>1</sub> sebesar 8,209, variabel X<sub>2</sub> sebesar 7,880, variabel X<sub>3</sub> sebesar 6,004 dan variabel X<sub>4</sub> sebesar 5,809. Nilai signifikasi seluruh variabel independen dinyatakan memenuhi asumsi non multikolinearitas karena memiliki nilai P<sub>value</sub> (Sig) < 10. Dapat disimpulkan dengan melihat nilai *tolerance* maupun nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) semua variabel (X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub> dan X<sub>4</sub>) tidak mengalami masalah multikolinearitas sehingga model regresi dianggap baik karena tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

#### 4.1.6.2 Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah regresi terjadi kesamaan varian dari residual pengamatan satu ke pengamatan lainnya. Bila nilai signifikansi hasil korelasi  $< 0,05$  maka persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas (Aisyah, 2015: 25).

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan uji heteroskedastisitas yaitu uji grafik plot, uji *park*, uji *glejser*, dan uji *white*. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan cara uji *park* karena untuk memenuhi kebutuhan asumsi non heteroskedastisitas.

**Tabel 4.8**  
**Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Sig.	Keterangan
X <sub>1</sub>	0,066	Asumsi non heteroskedastisitas terpenuhi
X <sub>2</sub>	0,037	Asumsi non heteroskedastisitas terpenuhi
X <sub>3</sub>	0,177	Asumsi non heteroskedastisitas terpenuhi
X <sub>4</sub>	0,123	Asumsi non heteroskedastisitas terpenuhi

Sumber: Data diolah peneliti, 2017

Berdasarkan tabel 4.8 pada uji heteroskedastisitas diketahui nilai signifikansi variabel independen (X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub> dan X<sub>4</sub>) telah melebihi 0,05 atau  $> 0,05$ . Nilai signifikansi variabel X<sub>1</sub> sebesar 0,066, variabel X<sub>2</sub> sebesar 0,037, variabel X<sub>3</sub> sebesar 0,177 dan variabel X<sub>4</sub> sebesar 0,123. Dapat dinyatakan tidak ada korelasi antara besarnya data dengan variabel pengganggu atau residual sehingga apabila data diperbesar tidak akan menyebabkan residual (kesalahan atau gangguan) semakin besar pula.

Dalam penelitian ini, apabila data dari rasio jumlah kantor per 100.000 penduduk dewasa ( $X_1$ ), rasio jumlah rekening tabungan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_2$ ), rasio jumlah rekening pembiayaan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_3$ ) dan persentase penyaluran pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan ( $X_4$ ) diperbesar maka tidak akan menyebabkan residual (kesalahan atau gangguan) semakin besar pula.

#### 4.1.6.3 Uji autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (Wikaya, 2009) dalam (Aisyah, 2015). Untuk memeriksa adanya autokorelasi biasanya dengan uji statistik Durbin-Watson (DW). Selanjutnya ditetapkan kaidah keputusan sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Kaidah Keputusan Durbin dan Watson**

<i>Range</i>	<b>Keputusan</b>
$0 < dw < dl$	Terjadi masalah autokorelasi yang positif yang perlu perbaikan
$dl < dw < du$	Ada autokorelasi positif tetapi lemah, dimana perbaikan akan lebih baik
$du < dw < 4-du$	Tidak ada masalah autokorelasi
$4-du < dw < 4-dl$	Masalah autokorelasi lemah, dimana dengan perbaikan akan lebih baik
$4-dl < d$	Masalah autokorelasi serius

Sumber: Aisyah, 2015: 30.

**Tabel 4.10**  
**Uji Autokorelasi**

dl	du	4-dl	4-du	dw	Keterangan
1,5897	1,7575	2,4103	2,2425	1,763	Asumsi non autokorelasi terpenuhi

Sumber: Data diolah peneliti, 2017

Berdasarkan tabel 4.10 pada uji autokorelasi diperoleh nilai  $du$  (1,7575)  $< dw$  (1,763)  $< 4-du$  (2,2425) sehingga keputusan yang diambil untuk *range* tersebut adalah tidak ada masalah autokorelasi.

#### 4.1.7 Uji Regresi Linear Berganda

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, digunakan uji F untuk menguji signifikansi secara serempak atau bersama-sama dan uji T untuk menguji signifikansi secara individual atau parsial.

##### 4.1.7.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen dalam satu penelitian. Apabila nilai  $R^2$  kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Apabila terjadi sebaliknya, maka kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen akan semakin baik. Koefisien dinyatakan dalam persentase dengan nilai berkisar antara  $0 < R^2 < 1$  Ghazali (2005) dalam Nurlestari (2015).

**Tabel 4.11**  
**Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

<b>R</b>	<b>R Square (<math>R^2</math>)</b>	<b>Adjusted R Square (<math>R^2</math>)</b>	<b>Std. Error of the Estimate</b>
0,968	0,938	0,935	0,19343

Sumber: Data diolah peneliti, 2017.

Berdasarkan tabel 4.11 pada uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan nilai R Square ( $R^2$ ) sebesar 0,938 atau 93,8 % yang artinya kemampuan variabel independen yang terdiri dari rasio jumlah kantor per 100.000 penduduk dewasa ( $X_1$ ), rasio jumlah rekening tabungan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_2$ ), rasio jumlah rekening pembiayaan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_3$ ) dan persentase penyaluran pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan ( $X_4$ ) menjelaskan pengaruhnya terhadap profitabilitas ( $Y$ ) sedangkan sisanya 0,062 atau 6,2 % dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

Angka R memiliki nilai sebesar 0,968 yang mendekati angka 1, artinya derajat keeratan hubungan variabel independen yang terdiri dari rasio jumlah kantor per 100.000 penduduk dewasa ( $X_1$ ), rasio jumlah rekening tabungan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_2$ ), rasio jumlah rekening pembiayaan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_3$ ) dan persentase penyaluran pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan ( $X_4$ ) sangat kuat dan mempunyai hubungan positif atau searah.

#### 4.1.7.2 Uji Signifikasi Simultan (Uji F)

Uji F pada penelitian ini digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen yaitu rasio jumlah kantor per 100.000 penduduk dewasa ( $X_1$ ), rasio jumlah rekening tabungan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_2$ ), rasio

jumlah rekening pembiayaan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_3$ ) dan persentase penyaluran pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan ( $X_4$ ) terhadap profitabilitas ( $Y$ ) secara simultan.

Dengan demikian, hipotesis yang muncul adalah:

$H_0$  : Variabel rasio jumlah kantor per 100.000 penduduk dewasa ( $X_1$ ), rasio jumlah rekening tabungan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_2$ ), rasio jumlah rekening pembiayaan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_3$ ) dan persentase penyaluran pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan ( $X_4$ ) secara simultan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas ( $Y$ ).

$H_a$  : Variabel rasio jumlah kantor per 100.000 penduduk dewasa ( $X_1$ ), rasio jumlah rekening tabungan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_2$ ), rasio jumlah rekening pembiayaan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_3$ ) dan persentase penyaluran pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan ( $X_4$ ) secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas ( $Y$ ).

Untuk membuat keputusan menolak atau menerima hipotesis di atas berlaku ketentuan jika nilai  $P_{\text{value}}$  (Sig) > 0,05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. sedangkan jika nilai  $P_{\text{value}}$  (Sig) < 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

**Tabel 4.12**  
**Uji F (Simultan Test)**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	52.790	4	13.197	352.728	.000 <sup>a</sup>
	Residual	3.517	94	.037		
	Total	56.307	98			

a. Predictors: (Constant), LN\_X4, LN\_X2, LN\_X3, LN\_X1

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 4.12 pada uji F di atas menunjukkan nilai  $P_{value}$  (Sig) sebesar  $0,000 < 0,05$  maka dapat dinyatakan variabel independen yang terdiri dari rasio jumlah kantor per 100.000 penduduk dewasa ( $X_1$ ), rasio jumlah rekening tabungan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_2$ ), rasio jumlah rekening pembiayaan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_3$ ) dan persentase penyaluran pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan ( $X_4$ ) secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas ( $Y$ ).

Secara bersama-sama atau serentak, variabel independen yang terdiri dari rasio jumlah kantor per 100.000 penduduk dewasa ( $X_1$ ), rasio jumlah rekening tabungan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_2$ ), rasio jumlah rekening pembiayaan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_3$ ) dan persentase penyaluran pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan ( $X_4$ ) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas ( $Y$ ). Dapat disimpulkan bahwa model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi profitabilitas pada perbankan syariah.

#### 4.1.7.3 Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Uji T adalah uji hipotesis yang digunakan untuk menguji pengaruh signifikan dari masing-masing variabel independen ( $X$ ) dimana penelitian ini mempunyai empat variabel independen antara lain rasio jumlah kantor per 100.000 penduduk dewasa ( $X_1$ ), rasio jumlah rekening tabungan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_2$ ), rasio jumlah rekening pembiayaan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_3$ ) dan persentase penyaluran pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan ( $X_4$ ) terhadap profitabilitas ( $Y$ ) secara parsial. Untuk membuat keputusan menolak atau menerima hipotesis di atas berlaku ketentuan jika nilai

$P_{\text{value}} (\text{Sig}) > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. sedangkan jika nilai  $P_{\text{value}} (\text{Sig}) < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

**Tabel 4.13**  
Uji T (*Partial Test*)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.803	.706		-2.553	.012
LN_X1	-1.456	.147	-1.516	-9.920	.000
LN_X2	.470	.130	.559	3.606	.000
LN_X3	-.205	.139	-.178	-1.475	.144
LN_X4	-.196	.143	-.148	-1.364	.176

a. Dependent Variable: Y

per 1.000 penduduk dewasa ( $X_2$ ) memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap profitabilitas (Y). Sedangkan rasio jumlah rekening pembiayaan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_3$ ) dan persentase penyaluran pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan ( $X_4$ ) tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap profitabilitas (Y).

Rasio jumlah kantor per 100.000 penduduk dewasa ( $X_1$ ) memiliki pengaruh namun negatif terhadap profitabilitas (Y). Meningkatnya jumlah kantor akan menurunkan tingkat profitabilitas (Y) pada perbankan syariah. Rasio jumlah rekening tabungan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_2$ ) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (Y). Jika jumlah rekening tabungan bertambah maka secara otomatis akan meningkatkan profitabilitas (Y). Rasio jumlah rekening pembiayaan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_3$ ) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (Y) sehingga apabila jumlah rekening tabungan bertambah atau berkurang maka tidak akan memberikan dampak apapun terhadap profitabilitas (Y) perbankan syariah. Persentase penyaluran pembiayaan UMKM

terhadap total pembiayaan ( $X_4$ ) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas ( $Y$ ). Jika penyaluran pembiayaan UMKM pada perbankan syariah tinggi maka tidak berarti profitabilitas ( $Y$ ) akan semakin tinggi pula.

#### 4.1.8 Uji Beda K Sampel Independen (*One-way* ANOVA)

Setelah data diuji dengan menggunakan uji homogenitas dan hasil menyatakan bahwa tiga varian terbukti tidak sama, barulah dilakukan uji beda K sampel independen (*One-Way* ANOVA) yang bertujuan untuk menguji apakah ketiga sampel mempunyai *mean* yang sama.

**Tabel 4.14**  
**Uji *One-way* ANOVA**

Variabel	Sig.	Keterangan
$X_1$	0,000	Signifikan
$X_2$	0,000	Signifikan
$X_3$	0,000	Signifikan
$X_4$	0,000	Signifikan

Sumber: Data diolah peneliti, 2017.

Berdasarkan tabel 4.15 pada uji *one-way* ANOVA di atas menunjukkan nilai signifikansi variabel independen ( $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  dan  $X_4$ ) masing-masing sebesar 0,000. Ketiga jenis perbankan syariah yaitu Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat dibedakan berdasarkan variabel independen yaitu rasio jumlah kantor per 100.000 penduduk dewasa ( $X_1$ ), rasio rekening tabungan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_2$ ), rasio rekening pembiayaan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_3$ ) dan persentase penyaluran

pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan ( $X_4$ ) karena mempunyai *mean* yang tidak sama.

**Tabel 4.15**  
Turkey HSD dan Bonferonni ( $X_1$ )

Komparasi Jenis	<i>Mean Difference</i>		Sig.
	Turkey HSD	Bonferonni	
BUS >> UUS	1,79601	1,79601	0,000
BUS >> BPRS	1,47950	1,47950	0,000
BPRS >> UUS	0,31651	0,31651	0,000

Sumber: Data diolah peneliti, 2017

Perbandingan inklusivitas keuangan berdasarkan rasio jumlah kantor per 100.000 penduduk dewasa ( $X_1$ ) pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menunjukkan hasil bahwa Bank Umum Syariah >> Bank Pembiayaan Rakyat Syariah >> Unit Usaha Syariah.  $H_{2a}$  dalam penelitian ini ditolak,  $H_{2a}$  yaitu Bank Umum Syariah lebih inklusif jika dibandingkan dengan Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan rasio jumlah kantor per 100.000 penduduk dewasa ( $X_1$ ).

**Tabel 4.16**  
Turkey HSD dan Bonferonni ( $X_2$ )

Komparasi Jenis	<i>Mean Difference</i>		Sig.
	Turkey HSD	Bonferonni	
BUS >> UUS	1,76789	1,76789	0,000
BUS >> BPRS	1,97575	1,97575	0,000
UUS >> BPRS	0,20786	0,20786	0,000

Sumber: Data diolah peneliti, 2017

Perbandingan inklusivitas keuangan berdasarkan rasio jumlah rekening tabungan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_2$ ) pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menunjukkan hasil bahwa Bank Umum Syariah >> Unit Usaha Syariah >> Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.  $H_{2b}$  dalam penelitian ini diterima,  $H_{2b}$  yaitu Bank Umum Syariah lebih inklusif dibandingkan dengan Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan rasio jumlah rekening tabungan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_2$ ).

**Tabel 4.17**  
**Turkey HSD dan Bonferonni ( $X_3$ )**

<b>Komparasi Jenis Bank Syariah</b>	<i>Mean Difference</i>	<i>Mean Difference</i>	<b>Sig.</b>
BUS >> BPRS	0,88375	0,88375	0,000
UUS >> BUS	0,68747	0,68747	0,000
UUS >> BPRS	1,57122	1,57122	0,000

Sumber: Data diolah peneliti, 2017

Perbandingan inklusivitas keuangan berdasarkan rasio jumlah rekening pembiayaan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_3$ ) pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menunjukkan hasil bahwa Unit Usaha Syariah >> Bank Umum Syariah >> Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.  $H_{2c}$  dalam penelitian ini ditolak,  $H_{2c}$  yaitu Bank Umum Syariah lebih inklusif dibandingkan dengan Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan rasio jumlah rekening pembiayaan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_3$ ).

**Tabel 4.18**  
**Turkey HSD dan Bonferonni (X<sub>4</sub>)**

<b>Komparasi Jenis Bank Syariah</b>	<i>Mean Difference</i>	<i>Mean Difference</i>	<b>Sig.</b>
BUS >> BPRS	0,72083	0,72083	0,000
UUS >> BUS	0,64573	0,64573	0,000
UUS >> BPRS	1,36656	1,36656	0,000

Sumber: Data diolah peneliti, 2017

Perbandingan inklusivitas keuangan berdasarkan persentase penyaluran pembiayaan UMKM per total pembiayaan (X<sub>4</sub>) pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menunjukkan hasil bahwa Unit Usaha Syariah >> Bank Umum Syariah >> Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. H<sub>2d</sub> dalam penelitian ini ditolak, H<sub>2d</sub> yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah lebih inklusif dibandingkan dengan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berdasarkan persentase penyaluran pembiayaan UMKM per total pembiayaan (X<sub>4</sub>).

#### **4.2 Pembahasan**

Pada sub bab ini akan dijelaskan pembahasan hasil uji penelitian mengenai pengaruh rasio jumlah kantor per 100.000 penduduk dewasa (X<sub>1</sub>), rasio rekening tabungan per 1.000 penduduk dewasa (X<sub>2</sub>), rasio rekening pembiayaan per 1.000 penduduk dewasa (X<sub>3</sub>) dan persentase penyaluran pembiayaan UMKM per total pembiayaan (X<sub>4</sub>) terhadap profitabilitas (Y) pada perbankan syariah di Indonesia.

#### 4.2.1 Pengaruh rasio jumlah kantor per 100.000 penduduk dewasa ( $X_1$ ) terhadap profitabilitas (Y)

Hasil uji regresi linear berganda tentang pengaruh rasio jumlah kantor per 100.000 penduduk dewasa ( $X_1$ ) terhadap profitabilitas (Y) menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan dengan koefisien negatif. Ketika rasio jumlah kantor per 100.000 penduduk dewasa ( $X_1$ ) semakin tinggi maka secara signifikan akan menurunkan profitabilitas perbankan syariah. Hasil penelitian ini menerima  $H_{1a}$  yaitu rasio jumlah kantor per 100.000 penduduk dewasa ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (Y).

Kantor adalah salah satu sarana fisik agar kegiatan atau operasi suatu perusahaan tetap berjalan. Dengan adanya kantor diharapkan perusahaan tersebut dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Upaya penambahan jumlah kantor adalah salah satu bentuk meningkatkan eksistensi perbankan syariah dan upaya melakukan ekspansi pasar. Namun hal tersebut akan memberikan berbagai dampak positif atau negatif, salah satunya yaitu bertambahnya biaya operasional suatu perusahaan.

Penambahan fisik jumlah kantor akan menambah biaya operasional dan berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas suatu perusahaan. Hasil tersebut didukung penelitian Azmi (2016) yang menemukan bahwa biaya operasional yang harus dikeluarkan menjadi besar dikarenakan bank masih dalam proses ekspansi pasar sehingga memerlukan dana operasional yang besar. Semakin tinggi biaya yang dikeluarkan bisa jadi merupakan deteksi bahwa aktifitas operasional yang dilakukan tidak efisien. Penelitian serupa pernah

dilakukan oleh Sabir, Ali dan Habbe (2012) dengan hasil yang didapat bahwa biaya operasional terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Untuk tetap menjaga keuangan inklusif di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia mengeluarkan program-program yang tidak lagi memerlukan fisik kantor sebagai sumber utama untuk menyediakan jasa atau layanan keuangan formal kepada masyarakat.

LAKU PANDAI atau Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain yang didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Tujuan program tersebut adalah menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau jasa atau layanan keuangan (Rachmani, 2015).

Dengan diterapkannya program LAKU PANDAI, maka lembaga keuangan termasuk perbankan syariah tidak perlu mendirikan fisik kantor yang dekat dengan masyarakat yang belum dapat menjangkau jasa atau layanan keuangan. Perbankan syariah dapat melakukan ekspansi pasar dengan cara memperbanyak agen-agen LAKU PANDAI tanpa harus mendirikan atau menyewa aset fisik berupa kantor, maka dari itu profitabilitas perbankan syariah akan bertambah ketika jumlah kantor menurun.

Dalam penelitian ini nilai koefisien standar untuk rasio jumlah kantor per 100.000 penduduk dewasa ( $X_1$ ) terhadap profitabilitas (Y) yang diperoleh dari uji

regresi linear berganda adalah -1,516. Jika perbankan syariah menambah satu unit variabel rasio jumlah kantor per 100.000 penduduk dewasa ( $X_1$ ) maka profitabilitas ( $Y$ ) akan menurun sebesar -1,516.

#### 4.2.2 Pengaruh rasio jumlah rekening tabungan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_2$ ) terhadap profitabilitas ( $Y$ )

Hasil uji regresi linear berganda tentang pengaruh rasio jumlah rekening tabungan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_2$ ) terhadap profitabilitas ( $Y$ ) menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan positif. Apabila rasio jumlah rekening tabungan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_2$ ) pada perbankan syariah meningkat, maka secara otomatis akan meningkatkan profitabilitas ( $Y$ ). Hasil penelitian ini menerima  $H_{1b}$  yaitu rasio rekening tabungan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap profitabilitas ( $Y$ ).

Jumlah rekening tabungan yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ( $Y$ ) dapat disebabkan karena minimnya rekening yang tidak aktif melakukan aktivitas operasional perbankan. Hasil penelitian Khoirunnisa (2015) menunjukkan bahwa rekening *dormant* tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat keuntungan bank. Hasil ini berimplikasi bahwa bank sebaiknya menurunkan jumlah rekening *dormant*, penurunan rekening *dormant* akan menaikkan dana pihak ketiga dan pada akhirnya kenaikan dana pihak ketiga ini akan mampu menaikkan tingkat keuntungan bank.

Rekening *dormant* merupakan rekening yang tidak ada aktivitas transaksi (mutasi) selama jangka waktu (6 bulan berturut-turut) sejak transaksi terakhir, dimana rekening tersebut akan berubah secara otomatis statusnya dari aktif

menjadi tidak aktif (pasif) atau *dormant*. Rekening pasif (*dormant account*) berasal dari kata *dormant* yang berarti terhenti, tidak aktif, tidur, dan kata *account* yang berarti catatan, uang, rekening. Bila didefinisikan secara lengkap rekening *dormant* dapat berarti akun tabungan atau giro yang tidak menunjukkan mutasi yang aktif, kecuali pencatatan pendapatan bunga atau margin pada jangka waktu tertentu, biasanya saldo tabungan atau giro ini kecil dan setiap bulan dibebani biaya jasa dalam jumlah tertentu atau sama dengan akun tidur.

Alasan lain untuk mendukung hasil penelitian ini adalah semakin banyak nasabah yang membuka rekening pada perbankan syariah maka akan menambah jumlah dana pihak ketiga (*funding*), hasil penelitian Mellawaty (2016) menunjukkan dana pihak ketiga berpengaruh signifikan dan memiliki koefisien positif terhadap *Return On Asset* (ROA) (Y). Banyaknya nasabah yang menabung otomatis akan menambah tingkat profitabilitas pada perbankan syariah.

Dalam penelitian ini nilai koefisien standar untuk rasio jumlah rekening tabungan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_2$ ) terhadap profitabilitas (Y) yang diperoleh dari uji regresi linear berganda adalah 0,559. Jika perbankan syariah menambah satu unit variabel rasio jumlah kantor per 100.000 penduduk dewasa ( $X_1$ ) maka profitabilitas (Y) akan meningkat sebesar 0,559.

#### 4.2.3 Pengaruh rasio jumlah rekening pembiayaan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_3$ ) terhadap profitabilitas (Y)

Hasil uji regresi linear berganda tentang pengaruh rasio rekening pembiayaan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_2$ ) terhadap profitabilitas (Y) menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan. Apabila jumlah rekening

pembiayaan naik atau turun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat profitabilitas (Y) pada perbankan syariah.

Besarnya nominal pembiayaan dalam rekening pembiayaan juga dapat menjadi salah satu penyebab rasio jumlah rekening pembiayaan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_3$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (Y). Ketika banyak masyarakat yang membuka rekening pembiayaan dan melakukan pembiayaan namun nominal atau volume pembiayaan terbilang kecil maka tidak akan meningkatkan laba perusahaan secara drastis. Azmi (2016) menunjukkan perbaikan kinerja keuangan perbankan syariah perlu dilakukan. Peningkatan jumlah volume pembiayaan yang disalurkan perlu ditingkatkan, terutama pada pembiayaan sektor produktif agar tingkat pengembalian modal dan pencapaian bagi hasil terjamin. Peningkatan profitabilitas merupakan salah satu tolak ukur kesuksesan pertumbuhan keuangan. Semakin besar volume transaksi pembiayaan yang disalurkan, maka akan semakin besar tingkat bagi hasil maupun margin keuntungan yang akan diterima oleh Bank Syariah.

Fenomena tingginya tingkat NPF perbankan syariah menjadi salah satu penyebab tidak signifikannya jumlah rekening pembiayaan terhadap profitabilitas. Menurut Harianto (2017) tingkat NPF mempengaruhi profitabilitas sehingga harus dilakukan peningkatan efisiensi dan menurunkan pembiayaan bermasalah. Tingginya pembiayaan bermasalah yang terjadi akan menghambat kinerja suatu perusahaan karena pokok dan margin atau keuntungan tidak diterima pada bulan tersebut dan dapat menyebabkan terjadinya *negative spread*.

#### 4.2.4 Pengaruh persentase penyaluran pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan ( $X_4$ ) terhadap profitabilitas (Y)

Hasil uji regresi linear berganda tentang pengaruh persentase penyaluran pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan ( $X_4$ ) terhadap profitabilitas (Y) pada perbankan syariah menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Besar kecilnya persentase penyaluran pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan ( $X_4$ ) tidak akan memberi dampak terhadap profitabilitas (Y) pada perbankan syariah.

Beberapa alasan yang mendukung hipotesis ini adalah kredit yang dialokasikan untuk pengembangan UMKM yang secara ekonomi layak tetapi belum *bankable* (Lubis dan Rachmina, 2011). Secara perekonomian, UMKM memang berperan besar dalam mendorong laju pertumbuhan. Namun ketika melihat kualitas dari masing-masing UMKM masih dianggap belum *bankable*. Mereka belum mengerti cara melakukan pencatatan akuntansi yang benar sesuai dengan ketentuan serta masih mencampur adukkan antara dana pribadi dan dana UMKM.

Akbar (2013) menemukan hasil penelitian bahwa bank syariah akan tetap menjalankan usahanya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dengan rasa tanggung jawab meskipun memiliki *Return On Asset* (ROA) yang rendah. Rasa tanggung jawab yang tinggi menyebabkan bank syariah tidak ragu untuk melakukan pembiayaan UMKM meskipun tidak ada jaminan bahwa profitabilitas perusahaan akan meningkat. Perbankan syariah berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan fungsi sosialnya sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya

*profit oriented* namun juga *falah oriented*. *Falah oriented* adalah prinsip yang dimiliki oleh perbankan syariah untuk tidak memfokuskan diri mencari keuntungan semata namun juga mencari kemenangan di dunia maupun di akhirat.

Dalam Q.S. Al Qashas ayat 77 yang berbunyi:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

Artinya:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi.

#### 4.2.5 Perbandingan inklusivitas keuangan berdasarkan rasio jumlah kantor per 100.000 penduduk dewasa ( $X_1$ ) pada perbankan syariah

Keberhasilan pembukaan kantor sangat ditentukan oleh ketepatan dalam menentukan lokasi wilayah. Dalam menetapkan lokasi wilayah kantor bank syariah, diperlukan kajian mengenai aspek sosial yang lebih diperluas berkaitan dengan karakteristik nasabah dari sisi keagamaan (Ma'arif dan Tanjung, 2003). Perbankan syariah mendapat nilai “plus” karena segala kegiatannya terlebih dahulu memperhatikan sisi keagamaan dan aspek sosial, jadi tidak sulit untuk lembaga-lembaga keuangan yang termasuk ke dalam perbankan syariah menerapkan program yang berhubungan dengan aspek sosial salah satunya adalah program keuangan inklusif.

Program keuangan inklusif telah dicanangkan pemerintah untuk mengatasi masalah kesenjangan kesejahteraan dalam bidang keuangan. Bukan

hanya pemerintah yang bisa menjalankan program ini, lembaga keuangan formal seperti Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah juga diperbolehkan ikut serta menyediakan jasa atau layanan keuangan formal bagi masyarakat target keuangan inklusif.

Hasil uji One-way ANOVA menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah lebih inklusif jika dibandingkan Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan rasio jumlah kantor per 100.000 penduduk dewasa ( $X_1$ ). Eksistensi dan daya tarik Bank Umum Syariah mampu membuatnya lebih dekat dengan masyarakat *in the bottom line of pyramid*. Bank Umum Syariah dianggap menyediakan akses jasa atau layanan keuangan formal lebih baik dari pada Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Penyediaan akses jasa atau layanan keuangan formal dalam bentuk kantor oleh Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah lebih baik dari pada Unit Usaha Syariah. Kantor yang disediakan oleh Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki kuantitas yang banyak dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat target keuangan inklusif. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terbukti menunjukkan dapat bersaing mengalahkan Unit Usaha Syariah karena Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat menyediakan kantor yang dekat dengan pemukiman masyarakat target keuangan inklusif tapi memang belum bisa mengalahkan Bank Umum Syariah. Bank Umum Syariah terbukti tidak hanya menyediakan akses berupa kantor di kota-kota besar atau pusat kota saja melainkan dapat masuk ke desa-desa di mana masyarakat belum tersentuh atau belum mendapat akses jasa layanan keuangan formal.

#### 4.2.6 Perbandingan inklusivitas keuangan berdasarkan rasio jumlah rekening tabungan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_2$ ) pada perbankan syariah

Hasil yang menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah lebih unggul jika dibandingkan jenis bank syariah yang lain berdasarkan rasio jumlah rekening tabungan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_2$ ) adalah bukti bahwa Bank Umum Syariah mampu menyediakan jasa atau layanan keuangan formal dalam bentuk tabungan lebih baik dari lainnya.

Tabungan masyarakat mempunyai peranan penting yaitu sebagai sumber dana yang paling mudah untuk didapatkan bagi perbankan. Untuk itu hasrat dan minat untuk menyimpan dana di lembaga perbankan perlu ditingkatkan dan dikembangkan. Pelaksanaan penerimaan rekening tabungan menemukan banyak kendala yang dirasakan masyarakat, salah satunya adalah syarat dan ketentuan yang rumit dan banyak. Contohnya, ketika KTP belum menjadi KTP Elektronik maka tidak bisa membuka rekening tabungan. Jika alamat tempat tinggal saat ini tidak sama dengan alamat yang tertera pada KTP juga bisa menjadi penghalang untuk membuka rekening tabungan. Adanya setoran awal minimal yang disyaratkan sebagai syarat untuk membuka rekening tabungan baru. Beberapa fenomena di atas dapat menjadi alasan Bank Umum Syariah lebih baik dari Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

#### 4.2.7 Perbandingan inklusivitas keuangan berdasarkan rasio jumlah rekening pembiayaan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_3$ ) pada perbankan syariah

Unit Usaha Syariah lebih inklusif jika dibandingkan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan rasio jumlah rekening

pembiayaan per 1.000 penduduk dewasa ( $X_3$ ). Hasil tersebut mengungkap fakta baru jika Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang diduga memiliki jumlah rekening tabungan lebih banyak dari pada Unit Usaha Syariah ternyata tidak lebih inklusif. Unit Usaha Syariah mampu membangun kedekatan dengan masyarakat dengan lebih baik dalam hal memberikan kesempatan masyarakat untuk melakukan pembiayaan. Unit Usaha Syariah mungkin memiliki strategi atau kiat-kiat khusus untuk menarik minat masyarakat dengan cara mempermudah syarat dan ketentuan untuk melakukan pembiayaan di Unit Usaha Syariah.

4.2.8 Perbandingan inklusivitas keuangan berdasarkan persentase penyaluran pembiayaan UMKM per total pembiayaan ( $X_4$ ) pada perbankan syariah

UMKM dianggap mampu mendongkrak perekonomian Indonesia ke arah yang lebih maju. Penyaluran pembiayaan UMKM adalah salah satu produk yang ditawarkan oleh perbankan dalam rangka menunjang kesejahteraan bagi negara maupun pelaku UMKM.

Dalam hipotesis penelitian ini, Unit Usaha Syariah dianggap tidak lebih baik dari Bank Umum Syariah maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mampu menunjukkan posisi lebih inklusif dibandingkan jenis perbankan syariah lainnya. Banyak kemungkinan yang terjadi yaitu minat pelaku UMKM untuk melakukan pembiayaan UMKM tinggi pada Unit Usaha Syariah atau Unit Usaha Syariah yang mudah melakukan penyaluran pembiayaan UMKM kepada pelaku UMKM. Kemungkinan lain adalah nasabah pelaku UMKM memindahkan aktivitas

keuangan dari Bank Induk Konvensional milik Unit Usaha Syariah kepada Unit Usaha Syariah.

Walaupun bank syariah memiliki berbagai kelebihan dan keunggulan dalam menggerakkan perekonomian, khususnya sektor UMKM, namun perlu diketahui bahwa pengaruh bank syariah terhadap pertumbuhan perekonomian nasional hanya 0,23% atau kurang dari 1%. Menurut analisis dari Bank Indonesia bahwa bank syariah akan bisa memengaruhi perekonomian nasional bahkan bisa memengaruhi inflasi jika peran bank syariah dalam pertumbuhan perekonomian nasional berkisar antara 10%-20%. Dalam sektor UMKM, yang merupakan salah satu stimulator perekonomian, peran pembiayaan syariah saat ini belum maksimal (Kara, 2013).

Meski kontribusi perkembangannya cukup besar, sektor UMKM bukannya tumbuh tanpa memiliki masalah. Masalah di sektor UMKM relatif begitu kompleks, dari masalah SDM, akses modal, budaya usaha, tingkat penguasaan teknologi maupun kemampuan manajemen. Sudah menjadi pengetahuan umum dimana tingkat pendidikan mayoritas pelaku usaha UMKM cukup rendah, budaya usaha yang belum terbangun baik ketika usaha yang dilakukan berdasarkan usaha turun temurun, pengelolaan dana usaha yang bercampur dengan keuangan rumah tangga dan lain sebagainya. Hal ini yang tengah dibenahi oleh pihak-pihak terkait secara berkesinambungan. Khusus untuk mengatasi masalah akses modal di sektor UMKM, saat ini bank syariah telah melakukan kerjasama dalam penyaluran pembiayaan ke sektor tersebut. Kerjasama tersebut berupa kerjasama pembiayaan yang menggunakan konsep

linkage, dimana bank syariah yang lebih besar menyalurkan pembiayaan UMKM-nya melalui lembaga keuangan syariah yang lebih kecil, seperti BPRS dan BMT. Hal ini dilakukan karena memang jangkauan bank syariah besar yang belum menjangkau pelosok-pelosok sentra masyarakat usaha kecil atau lembaga keuangan syariah yang kecil lebih menyentuh langsung dengan pelaku usaha UMKM (Almustofa, 2013).

Salah satu solusi yang ada untuk memaksimalkan fungsi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam penyaluran pembiayaan UMKM melalui skema pembiayaan *linkage*. Almustofa (2013) mengatakan bahwa skema pembiayaan *linkage* yang dilakukan bank syariah dengan BPRS atau BMT dapat berupa *channeling*, *executing* atau *joint financing*. Skema *channeling* menempatkan BPRS atau BMT sebagai intermedator BUS/UUS dengan pelaku UMKM. Sedangkan skema *executing* dilakukan ketika badan usaha syariah/unit usaha syariah (BUS/UUS) menyediakan pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh BPRS atau BMT dalam pembiayaan mereka ke nasabah UMKM-nya. Sementara itu, skema *joint financing* adalah skema dimana BUS/UUS dan BPRS/BMT bekerja sama dalam memberikan pembiayaan pada pelaku UMKM. Disamping itu, akhir-akhir ini terbentuk juga kerja sama bank-bank syariah dengan lembaga-lembaga terkait dalam memecahkan masalah lain yang menghantui dunia UMKM, seperti masalah budaya usaha, tingkat penguasaan teknologi dan kemampuan manajemen. Bank syariah bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan atau pengelola dana sosial dalam upaya meningkatkan budaya kerja, kemampuan manajemen UMKM dan penguasaan teknologi. Hal tersebut dilakukan dalam

bentuk program-program pembinaan nasabah. Pembinaan nasabah khususnya bagi nasabah UMKM telah menjadi faktor yang krusial dalam rangka menjaga pembiayaan UMKM yang berkualitas baik.

### 4.3 Kajian Keislaman

Implementasi keuangan inklusif dengan berbagai macam program seperti *branchless banking*, *mobile banking* dan *internet banking* adalah bentuk pemerintah dalam menyediakan jasa atau layanan keuangan formal untuk masyarakat secara tepat, cepat, nyaman dan mudah. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi yang berkembang seperti adanya *smartphone* sangat mendukung tercapainya keuangan inklusif di suatu daerah atau negara.

Perkembangan teknologi tidak terlepas dari peran manusia. Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di bumi yang memiliki akal sehingga dapat menerima pengetahuan, hikmah dan bebas berkehendak (Romlah, 2016).

Dalam Quran Surat Al Baqarah ayat 269 yang berbunyi:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو

الْأَلْبَابِ

Artinya:

Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang

dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).

Ayat tersebut menyiratkan bahwa manusia sebagai khalifah di bumi dapat melakukan banyak kajian, penelitian dan pengembangan dari karunia atau anugerah yang diberikan oleh Allah SWT. Hal itulah yang mendasari adanya perkembangan teknologi oleh manusia, berbagai macam pengembangan dalam aspek apapun dilakukan untuk kemaslahatan umat. Perkembangan teknologi berupa *smartphone* yang digunakan sebagai alat untuk mempermudah akses jasa atau layanan keuangan formal telah dilakukan untuk mewujudkan keuangan inklusif di Indonesia. Dengan adanya *smartphone*, masyarakat akan secara mudah dan cepat melakukan transaksi keuangan yang dibutuhkan tanpa harus datang ke kantor perbankan.

Peran perbankan syariah dalam mewujudkan keuangan inklusif perlu didukung dan diapresiasi, perbankan syariah memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan kemudahan akses jasa atau layanan keuangan formal kepada masyarakat karena perbankan syariah tidak hanya melakukan kegiatan untuk sekedar mencari profit semata, namun juga harus memikirkan ketenangan di dunia dan akhirat.

Perbankan syariah dituntut mendapatkan profit tapi juga menjalankan fungsi sosialnya untuk masyarakat. Keuangan inklusif adalah program yang tepat diterapkan pada perbankan syariah. Selain mencari nasabah dalam penghimpunan dana (*funding*) dan penyaluran dana (*landing*), perbankan syariah harus

menerapkan prinsip tolong menolong (*taawun*) kepada masyarakat yang membutuhkan, salah satunya adalah UMKM. Penyaluran pembiayaan UMKM perbankan syariah tidak hanya didasari untuk mencari profit yang tinggi namun juga turut serta dalam mendampingi, mengawasi dan memberikan pengarahan untuk pelaku UMKM tersebut agar dapat memahami secara jelas dari akad yang disepakati.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Keuangan inklusif berdasarkan dimensi akses yang meliputi rasio jumlah kantor per 100.000 penduduk dewasa berpengaruh signifikan dengan koefisien negatif terhadap profitabilitas, berdasarkan dimensi penggunaan yang meliputi rasio jumlah rekening tabungan per 1.000 penduduk dewasa berpengaruh signifikan dengan koefisien positif terhadap profitabilitas, rasio jumlah rekening pembiayaan per 1.000 penduduk dewasa dan persentase penyaluran pembiayaan UMKM per total pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
2. Perbandingan keuangan inklusif berdasarkan dimensi akses yang meliputi rasio jumlah kantor per 100.000 penduduk dewasa pada perbankan syariah menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah lebih inklusif dibandingkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan berdasarkan dimensi penggunaan yang meliputi rasio jumlah rekening tabungan per 1.000 penduduk dewasa pada perbankan syariah menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah lebih inklusif dibandingkan Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, rasio jumlah rekening pembiayaan per 1.000 penduduk dewasa pada perbankan syariah

menunjukkan bahwa Unit Usaha Syariah lebih inklusif dibandingkan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, persentase penyaluran pembiayaan UMKM per total pembiayaan pada perbankan syariah menunjukkan bahwa Unit Usaha Syariah lebih inklusif dibandingkan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti mengemukakan beberapa saran yang mungkin berguna untuk beberapa pihak di bawah ini:

1. Untuk pemerintah

Keuangan inklusif adalah salah satu langkah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata maka dari itu diharapkan agar lebih mendalam dalam pengawasan dan memperhatikan kondisi keuangan inklusif di lapangan. Diharapkan program-program yang mendukung seperti LAKU PANDAI, LAKU MIKRO, JARING dan LKD ini diberi anggaran khusus supaya tidak terhenti ataupun *stuck* di kondisi saat ini. Pemerintah juga perlu mensosialisasikan kembali keuangan inklusif bukan hanya pada kalangan pemerintahan ataupun perbankan saja, namun kepada seluruh kalangan masyarakat agar masyarakat mengetahui pentingnya memahami, mengakses dan menggunakan jasa atau layanan keuangan formal yang telah disediakan oleh pihak-pihak terkait.

## 2. Untuk peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan mampu memperluas atau memperdalam penelitian dengan menambah jumlah variabel independen seperti rasio dana pihak ketiga, rasio jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa, rasio jumlah ATM per 1.000 km<sup>2</sup> dan lain-lain. Mengganti atau menambah variabel dependen sesuai dengan teori atau penelitian terdahulu. Menggunakan alat analisis penelitian selain analisis regresi linear berganda dan uji beda K sampel independen. Meneliti perbandingan keuangan inklusif antara perbankan konvensional dan perbankan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, Esy Nur. (2015). *Manajemen Keuangan I*. Malang: Universitas Negeri Malang.

Aisyah, Esy Nur. (2015). *Statistik Inferensial Parametrik*. Malang: Universitas Negeri Malang.

Akbar, Gina Rhamdina. (2013). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Porsi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Disalurkan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia*. Program Studi Ekstensi, Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Almustofa, Mohammad Imsin. (2011). *Usaha Mikro dan Menengah yang Didukung Lembaga Keuangan dengan Pola Syariah sebagai Modal Kegiatan Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah*. Fakultas Ilmu Administrasi UNIPDU, Jombang.

Arifin, Johan. (2013). *Hubungan Hukum Kemitraan dalam Linkage Program Perbankan Syariah*. IAIN Walisongo, Semarang.

Azmi, Fika. (2016). *Analisis Pengaruh Volume Pembiayaan terhadap Profitabilitas dengan BOPO sebagai Variabel Moderasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Jurnal EBBANK. Volume 7, Nomor 2. Halaman 93-104.

Booklet Keuangan Inklusif 2014

Damajanti, Nadia Sri., Baskara, IN., Febrianti, Rini. (2014). *Pendidikan Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Peningkatan Kualitas Sumberdaya Insani*.

Efobi, Uchenna and Tanankem, Belmondo and Asongu, Simplicite and Beecroft, Ibukun. (2016). *Exploring Multidimensional Financial Inclusion and*

*Manufacturing Firms Performance in a Developing Country: The Case of Nigeria.* MPRA Paper No. 76589, posted 4 February 2017 10:07 UTC.

Ernawati. (2016). *Keuangan Inklusif Bank Umum Syariah dalam Mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah.* Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo Kendari. Al Falah: Journal of Islamic Economics. Volume 1, Nomor 1.

Garg, Sonu and Agarwal, Paul. (2014). *Financial Inclusion in India – a Review of Initiatives and Achievements.* IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM). Volume 16, Issue 6. Ver. I (Jun. 2014), PP 52-61.

Haldar, P.K. and Rahman, S.M. Mahbubur and Mia, Md. Shahin and Ahmed, Ferdousi and Bahsawir, Ahmad. (2016). *Assessing the Role of Corporate Social Responsibility Practices of Commercial Banks in Enhancing Financial Inclusion: A Study on Banking Sector in Bangladesh.* International Journal of Economics and Financial Issues, 2016, 6 (4), 1778-1783.

Hasan. (2011). *Analisis Industri Perbankan Syariah di Indonesia.* Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim, Semarang.

Harianto, Syawal. (2017). *Rasio Keuangan dan Pengaruhnya terhadap Profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.* Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen. Volume 7 (1). Halaman 41-48.

Harahap, Zul Anwar Ajim. (2014). *Konsep Maqasid Al-Syariah sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya dalam Hukum Islam Menurut Izzuddin Bin Abd Al-Salam (W. 660 H).* Takzir. Volume 9.

Haqiqi, Teuku Muhammad. (2015). *Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dengan Metode Stochastic Frontier Analysis Periode 2010-2013.*

Hidayah, Nur. (2016). *Implementasi Financial Inclusion (Keuangan Inklusif) bagi Masyarakat Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya.*

Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.

Husaeni, Uus Ahmad. (2017). *Determinan Pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia*. Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen. Volume 7 (1). Halaman 49-62.

Irodah, Millah. (2017). *Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Tingkat Kecukupan Modal terhadap Praktik Perataan Laba dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah Tahun 2011-2015)*. Skripsi (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Johnson, Katherine. (2013). *The Role of Islamic Banking in Economic Growth*. CMC Senior Theses. Paper 642.

Kasiram, Moh. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif- Kuantitatif*. Malang: UIN-Malang Press.

Khoirunnisa. (2015). *Pengaruh Rekening Dormant dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Laba Bank di Bank Syariah Mandiri*. Etikonomi: Volume 14 (1). Halaman 69-86.

Kustanti, Hesti. (2016). *Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dengan Metode Stochastic Frontier Analysis Periode 2010-2014*.

Lubis, Anna Maria., Rachmina, Dwi. (2011). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Realisasi dan Pengembalian Kredit Usaha Rakyat*. Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

Mandala, Jessica Devi. (2016). *Pengaruh Jumlah Kantor Bank, Jumlah ATM, dan Besarnya Pendapatan Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan di Jawa Timur Tahun 2014*. Skripsi, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang.

Ma'arif, M. Syamsul., Tanjung, Hendri. (2003). *Manajemen Operasi*. Jakarta: PT. Grasindo.

Mellawaty, Ranieta. (2016). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Profitabilitas*. Universitas Komputer Indonesia.

Metadata Keuangan Inklusif, Bank Indonesia.

Muflih, Muhammad. (2012). *Komparasi Tingkat Pembiayaan Mudarabah pada BPRS dan BUS-UUS di Indonesia*. Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi. Volume 4, Nomor 1. Halaman 127-138.

Ntambhi, Kalunda Elizabeth. (2015). *Financial Inclusion, Bank Stability, Bank Ownership and Financial Performance of Commercial Banks in Kenya*. Univeristy of Nairobi.

Nugroho, Rino Adi., Muharam, Harjum. (2011). *Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dengan Metode Stochastic Frontier Analysis Periode 2005-2009*.

Nengsih, Novia. (2015). *Peran Perbankan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia*. Jurnal Etikonomi. Volume 14 (2), Halaman 221-240.

Oktaviana, Ulfi Kartika., Fitriyah. (2012). *Financial Ratio to distinguish Islamic Banks, Islamic Business Units and Conventional Banks in Indonesia*. Jakarta Pusat: Kementrian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.

Ong, Nancy and Kwie, A and Jurgens. (2016). *Identifying Constraints to Financial Inclusion and their impact on GDP and Inequality: A case of Suriname*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

- Primadani, Renny Regina Setya. (2016). *Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan Pada Dimensi Akses Terhadap Perkembangan Dana Pihak Ketiga Masyarakat di Bank BRI Kota Batu Tahun 2011-2014*. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang.
- Purba, Marlina Fransiska. (2016). *Analisis Keterkaitan Indeks Inklusi Keuangan terhadap Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Jawa Tengah 2010-2014*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Puteri, Hesi Eka. (2015). *Kontribusi BPRS Merealisisasi Financial Inclusion dalam Penguatan Ekonomi Lokal: Evaluasi Penguatan Strategi*. Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies. Volume 1, Nomor 1.
- Rachmani, Feri Irina. (2015). *Kedudukan Agen dan Tanggung Gugat dalam Kegiatan Layanan Perbankan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inkusif "LAKU PANDAI"*. Tesis. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ailangga, Surabaya.
- Romlah, Siti. (2016). *Sains dan Teknologi dalam Al-Quran*. Sekolah Tinggi Agama Islam Pancawahana Bangil, Indonesia.
- Rojas, Liliana and Suarez. 2016. *Financial Inclusion in Latin America: Facts, Obstacles and Central Banks' Policy Issues*. Department of Research and Chief Economist. Discussion paper No. IDB-DP-464.
- Roa, Maria Jose. (2015). *Financial Inclusion in Latin America and the Caribbean: Access, Usage and Quality*. Research papers 19. First Edition, April 2015.
- Sarah, Hidayati. (2016). *Dampak Branchless Banking terhadap Kinerja Keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk*.
- Soejachmoen, Moekti P. (2016). *Inklusi Keuangan di Indonesia*. Centre for Strategic and International Studies (SCIS) dan Economic Research Institute and East Asia (ERIA).

Sarma, Mandira. (2012). *Index of Financial Inclusion – A Measure of Financial Sector Inclusiveness*. Jawaharlal Nehru University Delhi 110067, India.

Sanjaya, I Made dan Nursechafia. (2016). *Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Inkusif: Analisis Antar Provinsi di Indonesia*.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Widodo, Wahyu. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia Tahun 2005-2014. *Undergraduate Thesis*, STAIN Pekalongan.

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

[www.worldbank.org](http://www.worldbank.org)

Yasri. (2012). *Analisis Faktor Penentu Menjadi Nasabah Bank Syariah: (Perbandingan Segmen BPR Syariah dan Bank Umum/Unit Usaha Syariah di Sumatera Barat*. Jurnal Kajian Manajemen Bisnis. Volume 1, Nomor 2.

**Lampiran 1 Data Mentah Penelitian**

**DATA MENTAH PENELITIAN**

Periode	Jenis Bank	X1	X2	X3	X4	Y
Okt-14	BUS	1.19	33.56	0.73	37.9	0.56
Nov-14	BUS	1.18	34.75	0.72	33.7	0.49
Des-14	BUS	1.18	35.34	0.70	34.3	0.41
Jan-15	BUS	1.18	35.61	0.69	33.8	0.88
Feb-15	BUS	1.17	36.13	0.67	33.6	0.78
Mar-15	BUS	1.16	35.91	0.65	32.8	0.69
Apr-15	BUS	1.16	36.00	0.62	32.9	0.62
Mei-15	BUS	1.16	36.54	0.58	30.7	0.63
Jun-15	BUS	1.15	37.06	0.57	30.9	0.5
Jul-15	BUS	1.15	36.76	0.57	29.5	0.5
Agu-15	BUS	1.12	37.10	0.56	23.9	0.46
Sep-15	BUS	1.10	38.25	0.56	26.7	0.49
Okt-15	BUS	1.08	39.60	0.55	26.2	0.51
Nov-15	BUS	1.07	40.62	0.54	27.0	0.52
Des-15	BUS	1.07	41.55	0.54	26.5	0.49
Jan-16	BUS	1.06	42.08	0.53	26.0	1.01
Feb-16	BUS	1.03	42.33	0.52	25.9	0.81
Mar-16	BUS	1.02	43.00	0.52	25.8	0.88
Apr-16	BUS	1.00	43.53	0.51	26.1	0.8
Mei-16	BUS	0.98	44.21	0.51	26.0	0.16
Jun-16	BUS	0.96	44.03	0.51	26.7	0.73
Jul-16	BUS	0.96	44.58	0.50	26.7	0.63
Agu-16	BUS	0.94	45.93	0.49	26.5	0.48
Sep-16	BUS	1.00	48.82	0.50	25.2	0.59
Okt-16	BUS	1.00	51.52	0.50	25.0	0.46
Nov-16	BUS	0.98	53.34	0.49	25.0	0.67
Des-16	BUS	0.99	54.81	0.48	24.8	0.63
Jan-17	BUS	0.89	55.62	0.45	24.4	1.01
Feb-17	BUS	0.98	56.34	0.46	24.7	1.1
Mar-17	BUS	0.97	57.21	0.45	24.6	1.12
Apr-17	BUS	0.97	58.02	0.45	24.9	1.1
Mei-17	BUS	0.97	58.84	0.44	24.6	1.11
Okt-14	UUS	0.20	6.47	0.37	18.5	2.18
Nov-14	UUS	0.19	6.59	0.34	18.2	2.03

Des-14	UUS	0.17	6.73	0.35	17.6	1.97
Jan-15	UUS	0.18	6.83	0.34	17.2	1.93
Feb-15	UUS	0.18	6.87	0.34	17.0	1.94
Mar-15	UUS	0.18	6.96	0.33	16.6	2.39
Apr-15	UUS	0.17	7.04	0.30	11.6	2.42
Mei-15	UUS	0.18	7.11	0.30	10.9	2.4
Jun-15	UUS	0.18	7.06	0.30	11.2	2.2
Jul-15	UUS	0.18	7.06	0.30	10.9	2.05
Agu-15	UUS	0.18	6.52	0.30	10.7	2.14
Sep-15	UUS	0.17	6.42	0.30	10.8	2.15
Okt-15	UUS	0.17	6.37	0.30	11.7	2.22
Nov-15	UUS	0.17	6.49	0.29	10.5	2.15
Des-15	UUS	0.17	6.60	0.29	15.9	1.81
Jan-16	UUS	0.17	6.70	0.25	16.1	2.08
Feb-16	UUS	0.17	6.77	0.25	15.7	2.08
Mar-16	UUS	0.17	6.85	0.25	16.5	2.27
Apr-16	UUS	0.17	6.97	0.25	15.4	1.87
Mei-16	UUS	0.17	7.11	0.25	15.1	2.06
Jun-16	UUS	0.17	7.30	0.26	15.2	2.09
Jul-16	UUS	0.17	7.39	0.25	15.0	2.16
Agu-16	UUS	0.17	7.53	0.25	14.7	2.22
Sep-16	UUS	0.17	8.20	0.24	15.1	2.23
Okt-16	UUS	0.17	8.51	0.22	15.3	2.35
Nov-16	UUS	0.17	8.66	0.23	15.5	2.34
Des-16	UUS	0.18	8.81	0.23	14.9	1.77
Jan-17	UUS	0.15	8.94	0.23	15.7	2.66
Feb-17	UUS	0.17	9.00	0.23	14.4	2.67
Mar-17	UUS	0.18	9.08	0.23	14.8	2.61
Apr-17	UUS	0.18	9.19	0.23	15.1	2.54
Mei-17	UUS	0.18	9.33	0.23	14.8	2.61
Okt-14	BPRS	0.24	5.30	1.27	60.0	2.18
Nov-14	BPRS	0.24	5.48	1.26	60.3	2.21
Des-14	BPRS	0.24	5.39	1.24	60.1	2.26
Jan-15	BPRS	0.26	5.47	1.24	59.3	2.31
Feb-15	BPRS	0.26	5.48	1.24	59.1	2.23
Mar-15	BPRS	0.26	5.48	1.26	58.0	2.07
Apr-15	BPRS	0.23	5.58	1.25	58.8	2.19
Mei-15	BPRS	0.24	5.64	1.26	59.1	2.17
Jun-15	BPRS	0.23	5.70	1.27	59.4	2.3
Jul-15	BPRS	0.24	5.75	1.26	59.3	2.28

Agu-15	BPRS	0.24	5.80	1.26	59.1	2.34
Sep-15	BPRS	0.24	5.88	1.26	59.0	2.22
Okt-15	BPRS	0.24	5.94	1.25	58.7	2.2
Nov-15	BPRS	0.24	5.99	1.26	58.7	2.15
Des-15	BPRS	0.24	6.03	1.25	58.6	2.2
Jan-16	BPRS	0.24	6.09	1.26	57.9	2.32
Feb-16	BPRS	0.24	6.11	1.28	57.7	2.32
Mar-16	BPRS	0.24	6.17	1.30	57.7	2.25
Apr-16	BPRS	0.23	6.19	1.32	57.8	2.25
Mei-16	BPRS	0.23	6.23	1.35	57.7	2.16
Jun-16	BPRS	0.23	6.25	1.37	57.1	2.18
Jul-16	BPRS	0.23	6.31	1.37	56.7	2.21
Agu-16	BPRS	0.23	6.36	1.38	56.2	2.11
Sep-16	BPRS	0.23	6.21	1.27	53.9	2.45
Okt-16	BPRS	0.24	6.27	1.28	53.4	2.47
Nov-16	BPRS	0.24	6.34	1.32	53.1	2.34
Des-16	BPRS	0.24	6.40	1.32	53.6	2.27
Jan-17	BPRS	0.24	6.52	1.34	53.0	2.33
Feb-17	BPRS	0.24	6.52	1.38	52.9	2.31
Mar-17	BPRS	0.24	6.57	1.40	52.3	2.29
Apr-17	BPRS	0.24	6.61	1.44	52.1	2.3
Mei-17	BPRS	0.24	6.64	1.47	52.9	2.28

## Lampiran 2 Hasil Output SPSS Versi 16.0

## Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LN_X1	99	-1.90	.17	-1.0425	.78894
LN_X2	99	1.67	4.09	2.5242	.90101
LN_X3	99	-1.08	.82	-.1417	.65834
LN_X4	99	-4.79	-3.04	-4.0354	.57458
Valid N (listwise)	99				

## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.20163749
Most Extreme Differences	Absolute	.081
	Positive	.081
	Negative	-.063
Kolmogorov-Smirnov Z		.803
Asymp. Sig. (2-tailed)		.539

a. Test distribution is Normal.

## Test of Homogeneity of Variances

	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
X1	116.548	2	96	.000
X2	65.321	2	96	.000
Inv_X3	74.978	2	96	.000
Inv_X4	37.072	2	96	.000

Model Summary<sup>a</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.964 <sup>a</sup>	.929	.926	.20588

a. Predictors: (Constant), Inv\_X4, X2, Inv\_X3, X1

b. Dependent Variable: Y

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.722	.058		47.072	.000		
	X1	-1.826	.147	-.977	-12.429	.000	.122	8.209
	X2	-3.694E-5	.003	.000	-.012	.991	.127	7.880
	Inv_X3	.045	.080	.038	.558	.578	.167	6.004
	Inv_X4	-7.425	4.340	-.113	-1.711	.090	.172	5.809

a. Dependent Variable: Y

**Coefficient Correlations<sup>a</sup>**

Model			Inv_X4	X2	Inv_X3	X1
1	Correlations	Inv_X4	1.000	.044	-.895	-.017
		X2	.044	1.000	-.194	-.934
		Inv_X3	-.895	-.194	1.000	.192
		X1	-.017	-.934	.192	1.000
	Covariances	Inv_X4	18.838	.001	-.310	-.011
		X2	.001	1.009E-5	-4.924E-5	.000
		Inv_X3	-.310	-4.924E-5	.006	.002
		X1	-.011	.000	.002	.022

a. Dependent Variable: Y

**Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>**

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions				
				(Constant)	X1	X2	Inv_X3	Inv_X4
1	1	4.031	1.000	.01	.00	.00	.00	.00
	2	.787	2.263	.00	.02	.02	.01	.01
	3	.133	5.498	.67	.00	.06	.04	.02
	4	.028	12.087	.32	.78	.71	.06	.20
	5	.021	13.745	.01	.20	.21	.89	.77

a. Dependent Variable: Y

**Residuals Statistics<sup>a</sup>**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	.4805	2.3081	1.7211	.73069	99
Residual	-.67188	.41972	.00000	.20164	99
Std. Predicted Value	-1.698	.803	.000	1.000	99
Std. Residual	-3.263	2.039	.000	.979	99

a. Dependent Variable: Y

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.436 <sup>a</sup>	.190	.156	2.11159

a. Predictors: (Constant), LN\_X4, LN\_X2, LN\_X3, LN\_X1

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-24.975	7.711		-3.239	.002
	LN_X1	-2.980	1.603	-1.023	-1.860	.066
	LN_X2	3.008	1.424	1.179	2.112	.037
	LN_X3	2.064	1.519	.591	1.359	.177
	LN_X4	-2.435	1.566	-.609	-1.555	.123

a. Dependent Variable: LN\_Y

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.436 <sup>a</sup>	.190	.156	2.11159	1.763

a. Predictors: (Constant), LN\_X4, LN\_X2, LN\_X3, LN\_X1

b. Dependent Variable: LN\_Y

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.803	.706		-2.553	.012
	LN_X1	-1.456	.147	-1.516	-9.920	.000
	LN_X2	.470	.130	.559	3.606	.000
	LN_X3	-.205	.139	-.178	-1.475	.144
	LN_X4	-.196	.143	-.148	-1.364	.176

a. Dependent Variable: Y

**Descriptives**

		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
						Lower Bound	Upper Bound		
LN_X1	0	33	.0493	.08466	.01474	.0193	.0794	-.12	.17
	1	33	-1.7467	.04762	.00829	-1.7636	-1.7298	-1.90	-1.61
	2	33	-1.4302	.03231	.00562	-1.4416	-1.4187	-1.47	-1.35
	Total	99	-1.0425	.78894	.07929	-1.1998	-.8851	-1.90	.17
LN_X2	0	33	3.7721	.18259	.03179	3.7074	3.8369	3.51	4.09
	1	33	2.0042	.13081	.02277	1.9578	2.0506	1.85	2.25
	2	33	1.7964	.06820	.01187	1.7722	1.8205	1.67	1.90
	Total	99	2.5242	.90101	.09055	2.3445	2.7039	1.67	4.09
LN_X3	0	33	-.0763	.14661	.02552	-.1283	-.0243	-.38	.13
	1	33	.6112	.15389	.02679	.5566	.6657	.30	.82
	2	33	-.9601	.05074	.00883	-.9780	-.9421	-1.08	-.91
	Total	99	-.1417	.65834	.06617	-.2730	-.0104	-1.08	.82
LN_X4	0	33	-4.0104	.12797	.02228	-4.0557	-3.9650	-4.33	-3.87
	1	33	-3.3646	.16774	.02920	-3.4241	-3.3052	-3.61	-3.04
	2	33	-4.7312	.05165	.00899	-4.7495	-4.7129	-4.79	-4.62
	Total	99	-4.0354	.57458	.05775	-4.1500	-3.9208	-4.79	-3.04

**Test of Homogeneity of Variances**

	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
LN_X1	28.448	2	96	.000
LN_X2	15.252	2	96	.000
LN_X3	19.771	2	96	.000
LN_X4	13.056	2	96	.000

**ANOVA**

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
LN_X1	Between Groups	60.662	2	30.331	8.684E3	.000
	Within Groups	.335	96	.003		
	Total	60.998	98			
LN_X2	Between Groups	77.795	2	38.897	2.118E3	.000
	Within Groups	1.763	96	.018		
	Total	79.558	98			
LN_X3	Between Groups	40.946	2	20.473	1.286E3	.000
	Within Groups	1.528	96	.016		
	Total	42.474	98			
LN_X4	Between Groups	30.844	2	15.422	980.594	.000
	Within Groups	1.510	96	.016		
	Total	32.354	98			

## Multiple Comparisons

Dependent Variable		(I) Jenis Bank	(J) Jenis Bank	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
							Lower Bound	Upper Bound
LN_X1	Tukey HSD	0	1	1.79601*	.01455	.000	1.7614	1.8306
			2	1.47950*	.01455	.000	1.4449	1.5141
		1	0	-1.79601*	.01455	.000	-1.8306	-1.7614
			2	-.31651*	.01455	.000	-.3511	-.2819
		2	0	-1.47950*	.01455	.000	-1.5141	-1.4449
			1	.31651*	.01455	.000	.2819	.3511
	Bonferroni	0	1	1.79601*	.01455	.000	1.7606	1.8315
			2	1.47950*	.01455	.000	1.4440	1.5150
		1	0	-1.79601*	.01455	.000	-1.8315	-1.7606
			2	-.31651*	.01455	.000	-.3520	-.2811
		2	0	-1.47950*	.01455	.000	-1.5150	-1.4440
			1	.31651*	.01455	.000	.2811	.3520
LN_X2	Tukey HSD	0	1	1.76789*	.03336	.000	1.6885	1.8473
			2	1.97575*	.03336	.000	1.8963	2.0552
		1	0	-1.76789*	.03336	.000	-1.8473	-1.6885
			2	.20786*	.03336	.000	.1284	.2873
		2	0	-1.97575*	.03336	.000	-2.0552	-1.8963
			1	-.20786*	.03336	.000	-.2873	-.1284
	Bonferroni	0	1	1.76789*	.03336	.000	1.6866	1.8492
			2	1.97575*	.03336	.000	1.8945	2.0571
		1	0	-1.76789*	.03336	.000	-1.8492	-1.6866
			2	.20786*	.03336	.000	.1266	.2892
		2	0	-1.97575*	.03336	.000	-2.0571	-1.8945
			1	-.20786*	.03336	.000	-.2892	-.1266
LN_X3	Tukey HSD	0	1	-.68747*	.03106	.000	-.7614	-.6135
			2	.88375*	.03106	.000	.8098	.9577
		1	0	.68747*	.03106	.000	.6135	.7614
			2	1.57122*	.03106	.000	1.4973	1.6452
		2	0	-.88375*	.03106	.000	-.9577	-.8098
			1	-1.57122*	.03106	.000	-1.6452	-1.4973
	Bonferroni	0	1	-.68747*	.03106	.000	-.7632	-.6118
			2	.88375*	.03106	.000	.8081	.9594
		1	0	.68747*	.03106	.000	.6118	.7632
			2	1.57122*	.03106	.000	1.4955	1.6469
		2	0	-.88375*	.03106	.000	-.9594	-.8081
			1	-1.57122*	.03106	.000	-1.6469	-1.4955
LN_X4	Tukey HSD	0	1	-.64573*	.03087	.000	-.7192	-.5722
			2	.72083*	.03087	.000	.6473	.7943
		1	0	.64573*	.03087	.000	.5722	.7192
			2	1.36656*	.03087	.000	1.2931	1.4401
		2	0	-.72083*	.03087	.000	-.7943	-.6473
			1	-1.36656*	.03087	.000	-1.4401	-1.2931
	Bonferroni	0	1	-.64573*	.03087	.000	-.7210	-.5705
			2	.72083*	.03087	.000	.6456	.7961
		1	0	.64573*	.03087	.000	.5705	.7210
			2	1.36656*	.03087	.000	1.2913	1.4418
		2	0	-.72083*	.03087	.000	-.7961	-.6456
			1	-1.36656*	.03087	.000	-1.4418	-1.2913

\*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

### Lampiran 3 Biodata Peneliti

#### BIODATA PENELITI



Nama Lengkap : Khalifatul Uzhma  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 06 Januari 1996  
Alamat Asal : Jalan Raya Mulyoagung Nomor 108 Jetis  
RT 003 / RW 010 Desa Mulyoagung  
Kecamatan Dau Kabupaten Malang  
Alamat Kos : -  
Telepon/HP : 081260050317  
Email : [uzhmakhalifa@gmail.com](mailto:uzhmakhalifa@gmail.com)  
Facebook : Uzhma Khalifa

#### Pendidikan Formal

1999-2001 : TK RA. Hasanudin Mulyoagung Dau  
2001-2007 : Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mulyoagung I Dau  
2007-2010 : Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Batu  
2010-2013 : Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Malang I  
2013-2017 : Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Negeri (UIN)  
Maulana Malik Ibrahim Malang

### **Pendidikan Non Formal**

- 2013-2014 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab  
Universitas Islam Negeri (UIN)  
Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2014-2015 : English Language Center (ELC)  
Universitas Islam Negeri (UIN)  
Maulana Malik Ibrahim Malang

### **Pengalaman Organisasi**

-

### **Aktivitas dan Pelatihan**

- Peserta Seminar “Yuk Berekonomi Islam” pada tanggal 16 November 2013 di Auditorium Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta Kuliah Tamu Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah dengan Tema “ Membangun Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul di Perbankan Syariah” pada tanggal 12 Juni 2014
- Peserta Kuliah Tamu “English Learning Strategies” pada tanggal 15 Oktober 2014 yang diselenggarakan oleh English Language Center (ELC) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta Kuliah Tamu Jurusan Perbankan Syariah (S1) dengan Tema “Urgensi Hybrid Contract dalam Mengembangkan Produk Perbankan Syariah” pada tanggal 11 Mei 2015 yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta Seminar Entrepreneurship pada tanggal 22 November 2014 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta Kuliah Tamu “Understanding Sukuk in Islamic Finance” pada tanggal 14 Maret 2016 yang diselenggarakan oleh Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

- Peserta Training “Character Building” dengan Tema “Remarkable Young Generation” pada tanggal 30 September 2014 2015 yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta International Conference on Islamic Economics and Business (CONIES 2015) dengan Tema “Strengthening Islamic Economics in Facing AEC (ASEAN Economic Community)” pada tanggal 2-3 November 2015 di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta Seminar Nasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Tema “Independensi OJK dalam Lalu Lintas Jasa Keuangan di Indonesia” pada tanggal 6 November 2013 yang diselenggarakan oleh DEMA Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta Workshop Kepribadian dan Komunikasi dengan Tema “Bankir Syariah yang Berkarakter Ulul Albab” pada tanggal 20 Mei 2016 yang diselenggarakan Jurusan Perbankan Syariah (S1) di Aula Fakultas Saintek Lantai IV Sebelah Utara Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta Talkshow dengan Judul “Bahasa Arba Masyhur Negara Makmur” pada tanggal 12 Mei 2015 di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta Seminar Nasional Fakultas Ekonomi dengan Tema “Membentuk Calon Wirausahawan Muda, Tangguh, Kreatif, Inovatif dan Berjiwa Ulul Albab” pada tanggal 20 Oktober 2015 di Aula Rektorat Lantai V Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta Roadshow Sekolah Pasar Modal Syariah pada tanggal 5 September 2016 di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta Kuliah Tamu dengan Tema “Peran dan Fungsi Bank Sentral: Dari Masa Rasulullah Sampai Kini” pada tanggal 21 Mei 2014 yang diselenggarakan oleh Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

- Peserta Bedah Buku “Rantau 1 Muara” dalam Kegiatan Festival Budaya dengan Tema “Menjelajahi Permai Budaya Indonesia” pada tanggal 26 November 2015 yang diselenggarakan oleh DEMA Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta dalam Acara Kontes Dangdut Islami (KDI) pada tanggal 30 April-6 Mei 2014 yang diselenggarakan oleh Mabna Ibnu Rusyd Pusat Ma’had Al-Jami’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta dan Pemenang Juara III dalam MSAA Idol pada tahun 2014 yang diselenggarakan oleh Mabna Faraby Pusat Ma’had Al-Jami’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta dalam Kegiatan Talkshow Teater bersama Ratna Riantiarno dengan Tema “Teater adalah Kinerja Tim: Menyelaraskan Langkah Tim Produksi dan Artistik sebagai Modal Utama Berteater” pada 13 Februari 2016 yang diselenggarakan di Aula Fakultas Sastra, Gedung E6 Lantai 2, Universitas Negeri Malang
- Peserta Seminar Nasional Kewirausahaan “Psycho-Business” pada tanggal 30 November 2014 di Gedung Samantha Krida Universitas Brawijaya

## Lampiran 4 Bukti Konsultasi

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Khalifatul Uzhma  
NIM/Jurusan : 13540045/Perbankan Syariah (S1)  
Pembimbing : Esy Nur Aisyah, SE., MM.  
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Keuangan Inklusif terhadap Profitabilitas pada Perbankan Syariah di Indonesia

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	28 Oktober 2016	Pengajuan <i>Outline</i>	1. 
2.	05 April 2017	Revisi dan Acc Bab I, II, III (Proposal Skripsi)	2. 
3.	24 April 2017	Seminar Proposal	3. 
4.	08 Mei 2017	Acc Proposal Skripsi	4. 
5.	25 Juni 2017	Bab IV dan V	5. 
6.	25 Agustus 2017	Revisi dan Acc Bab I-V	6. 
7.	07 September 2017	Seminar Hasil	7. 
8.	18 Oktober 2017	Acc Skripsi	8. 
9.	31 Oktober 2017	Ujian Skripsi	9. 

Malang, 10 November 2017

Mengetahui:

Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1)



Eko Suprafitno, SE., M.Si., Ph.D

NIP. 19751109 199903 1 003